

# TOLERANSI SOSIAL MASYARAKAT PERKOTAAN

---

Survey Opini Publik di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang  
SETARA Institute Jakarta, 29 Nopember 2010

---

# TOLERANSI SOSIAL MASYARAKAT PERKOTAAN

Survey Opini Publik di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang  
SETARA Institute Jakarta, 29 Nopember 2010

## I

### PENGANTAR

Dinamika kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir 2007-2009 masih dalam kondisi memprihatinkan. SETARA Institute mencatat pada tahun 2007 terdapat 185 jenis tindakan dalam 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan; pada tahun 2008 terdapat 367 tindakan dalam 265 peristiwa, dan pada tahun 2009 terdapat 291 tindakan dalam 200 peristiwa. Sebagian besar peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan semuanya berhubungan dengan organisasi-organisasi Islam radikal.

Ketegangan sosial dan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang paling serius adalah terkait dengan tempat ibadah kelompok agama minoritas, kriminalisasi keyakinan jemaat Ahmadiyah, dan *hate speech*. Sedangkan kelompok yang paling serius mengalami kekerasan dan menjadi sasaran persekusi adalah jemaat Kristiani dan jemaat Ahmadiyah. Potret mencemaskan terkait kebebasan beragama/ berkeyakinan sepanjang tiga tahun terakhir menunjukkan intoleransi yang semakin menguat dan kegagalan negara memberikan jaminan konstitusional kebebasan sipil warga negara.

Pararel dengan inflasi pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan perkembangan organisasi-organisasi Islam radikal semakin agresif mempromosikan pandangan dan praktik intoleransi di tengah masyarakat dengan material isu aliran sesat, kristenisasi, anti maksiat, dan anti pemutadan. Material isu tersebut kemudian dikapitalisasi sebagai cara untuk memperluas dukungan 'melindungi akidah ummat'. Beberapa peristiwa mutakhir menunjukkan secara nyata kaitan tegas antara aktivitas sejumlah organisasi Islam radikal dengan peristiwa persekusi dan kekerasan atas nama agama dan moralitas.

Sementara, pemerintah masih belum menunjukkan keseriusannya dalam menindak secara hukum pelaku-pelaku kekerasan dan belum menunjukkan upaya dan langkah-langkah holistik dalam rangka menghapus praktik intoleransi dan diskriminasi agama/ keyakinan. Respons pemerintah masih terbatas dalam bentuk reaksi sporadis dan instan dalam menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Bahkan

dalam beberapa isu, pemerintah justru terlampau aktif mempromosikan intoleransi dan diskriminasi.

Laporan SETARA Institute juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi di Jawa Barat, Jakarta dan di pinggiran kota Jakarta seperti: Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Di wilayah-wilayah ini pula, organisasi Islam radikal bersemai dan tumbuh serta menjadikan wilayah-wilayah ini sebagai wilayah 'dakwah' utama.

Terdapat beberapa studi yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait dengan keberadaan organisasi Islam radikal, tapi selama ini kajian dilakukan lebih pada sosok organisasi-organisasi radikal dengan seperangkat sejarah pembentukan, visi, misi, dan aksi-aksinya. Sedangkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan organisasi-organisasi radikal tersebut belum banyak dilakukan.

SETARA Institute, selain sedang mempersiapkan laporan tentang radikalisme agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, saat ini telah melakukan survey opini publik tentang toleransi sosial masyarakat perkotaan. Area survey meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Survey ini merupakan bagian tak terpisahkan dari studi tentang radikalisme agama dan implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang sedang dilakukan.

### **Tujuan**

Survey opini publik tentang Toleransi Sosial Masyarakat Perkotaan bertujuan untuk:

- a. mengetahui tingkat toleransi masyarakat perkotaan;
- b. mengetahui opini masyarakat terhadap dinamika kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk terhadap organisasi-organisasi Islam radikal;
- c. menghimpun pendapat masyarakat terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh negara dalam merespons berbagai peristiwa kebebasan beragama/ berkeyakinan.

### **Metodologi**

Survey jajak pendapat ini dilakukan di 5 Kotamadya DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi. Sampel dalam survey ini sebanyak 1200 responden yang dipilih secara acak sistematis (*systematic sampling*) dengan kerangka sampel Kartu Keluarga. Dengan jumlah sampel 1200 orang, *margin of error* penelitian ini +/- 2,2% dan berada pada tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap

muka (*face to face interview*) dengan bantuan panduan wawancara terstruktur (*questionnair*). Survey opini publik dilakukan sejak tanggal 20 Oktober – 10 Nopember 2010.

### **Demografi**

Usia responden dalam survey ini sebagian besar adalah masyarakat pada kelompok usia 40 tahun ke bawah dengan total (70,8%) . Sedangkan yang berusia di atas 41 tahun berjumlah (29,2%). Dari jenis kelamin, survey ini menjanging (49,2%) perempuan dan (50,8%) laki-laki.

Responden tersebar di Jakarta Pusat (8,3%), Jakarta Timur (12,5%), Jakarta Utara (12,5%), Jakarta Selatan (16,7%), Jakarta Barat (16,7%), dan masing-masing (8,3%) berdomisili di Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang.

Mayoritas pendidikan responden adalah lulusan SLTA/ sederajat (50,6%). Berikutnya (16,8%) lulusan SLTP, (11,9%) lulusan SD, (10,3%) lulusan S-1 atau di atasnya, (8,4%) Diploma/ Akademi, dan (2%) tidak pernah sekolah.

Dari 1200 responden, (89,2%) responden beragama Islam. Selanjutnya masing-masing Protestan (5,2%), Katholik (3,7%), Hindu (0,2%), Budha (1,6%), Konghucu (0,1%). Sementara dari sudut pekerjaan, mayoritas didominasi oleh karyawan swasta (44,3%) dan (26,9%) Ibu Rumah Tangga. Mayoritas responden (45,3) mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hidupnya Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000 pada setiap bulannya. Berikutnya kurang dari Rp. 500.000 (29%), kisaran 2 – 3 juta (15,4%), dan di atas 3 juta sebanyak (10,2%)

## 2

### TEMUAN-TEMUAN

Survey tentang Toleransi Masyarakat Perkotaan terutama dimaksudkan untuk mengukur tingkat toleransi masyarakat, tetapi selain tema tentang pluralisme dan toleransi terdapat juga tema lain yang ditanyakan secara spesifik kepada setiap responden. Tema yang disajikan dalam laporan ini adalah [1] Pluralisme dan Toleransi; [2] Konflik dan Kekerasan; [3] Terorisme; [4] Pancasila; [5] Hukum Sekuler versus Syariah; dan [6] Demokrasi versus Khilafah.

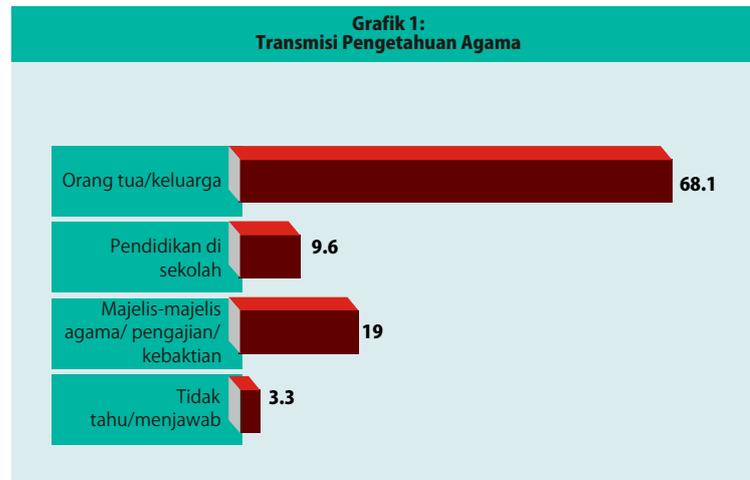
#### 2.1. Pluralisme dan Toleransi

Dalam hal ketaatan terhadap ajaran agama, sebagian besar warga Jabodetabek mengidentifikasi dirinya sebagai “biasa saja” dalam menjalankan agama/ keyakinanya (47,3%). Sedangkan yang mengidentifikasi sebagai taat sebanyak (44,8%). Selanjutnya sangat taat (6%), tidak taat (0,3%), dan sisanya (1,5%) tidak menjawab.

Sebagian besar responden memperoleh pengetahuan agama berasal dari jalur keluarga. Dibandingkan dengan sumber-sumber pembentukan perilaku keagamaan lain, faktor sosialisasi melalui jalur keluarga ternyata memainkan peran penting dalam membentuk sikap keagamaan masyarakat Jabodetabek.

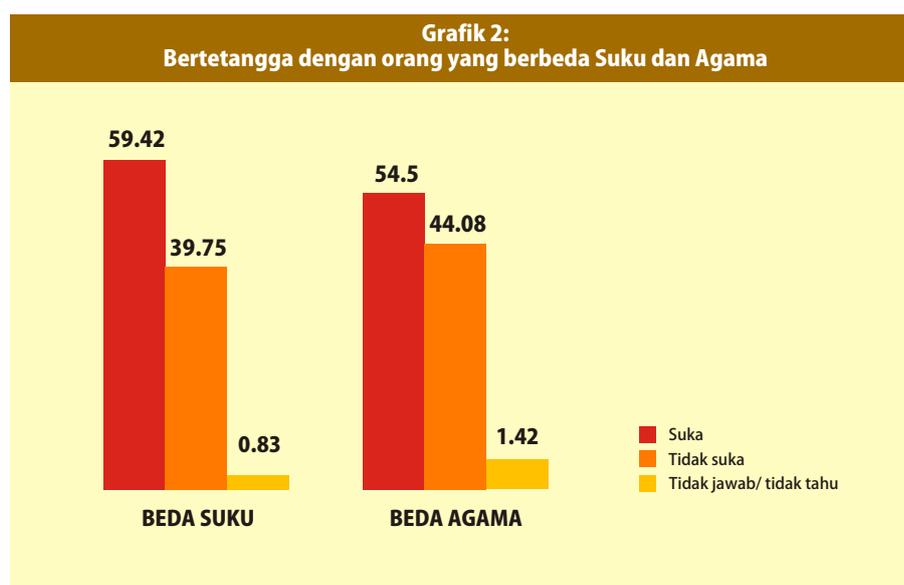
Dengan demikian, berbagai pandangan, posisi dan sikap keagamaan, termasuk di dalam merespon berbagai peristiwa sosial, sebagaimana yang tercermin dari hasil survey ini, sebagian besar dipengaruhi faktor sosialisasi nilai-nilai keagamaan yang diperoleh melalui jalur ‘pendidikan’ keluarga. Namun demikian, keterbukaan informasi dan agresifitas dakwah sejumlah organisasi Islam, baik melalui jalur sekolah/ perguruan tinggi, dan majelis-majelis agama dipastikan turut serta membentuk karakter keagamaan baru para responden.

[Lihat Grafik 1]

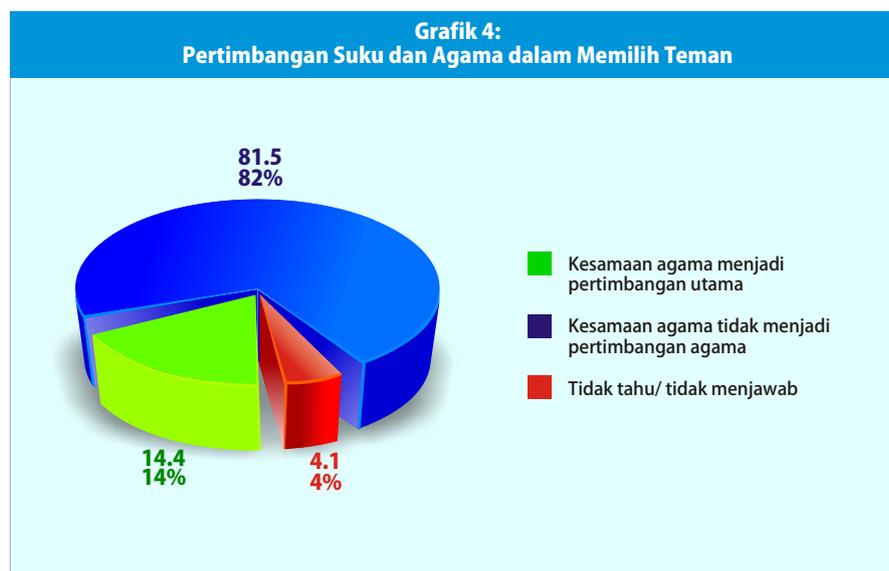
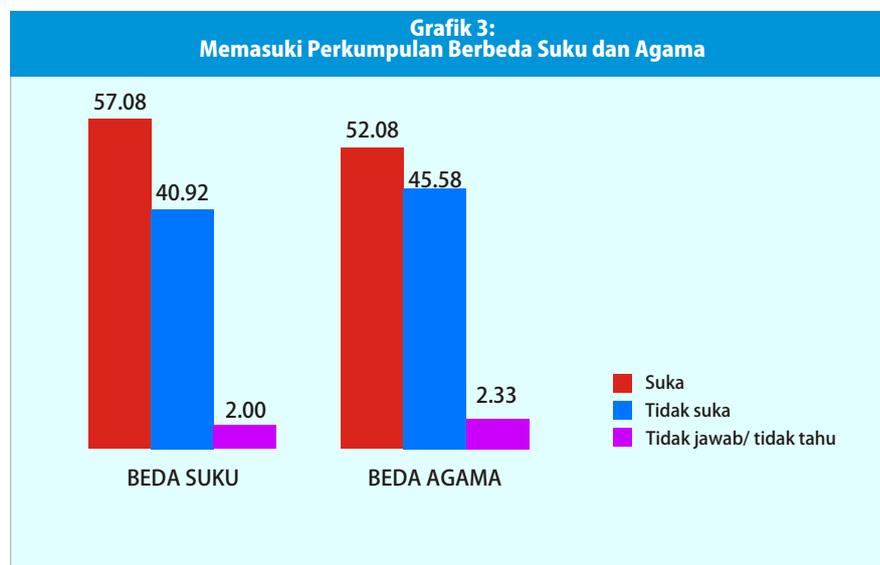


Secara umum dapat dikatakan bahwa identifikasi diri dari sebagian besar warga Jabodetabek tidak didasarkan atas keagamaan ataupun etnisitas tertentu. Hasil survey ini memperlihatkan bahwa perasaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia tampak jauh lebih kuat (74,6%) dibandingkan dengan perasaan sebagai bagian dari umat beragama ataupun suku-bangsa tertentu (17,1%). Sisanya (8,3%) tidak menjawab. Kondisi kehidupan di wilayah urban yang relatif lebih berkembang dan plural boleh jadi ikut memberikan kontribusi bagi munculnya persepsi semacam itu.

Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bertetangga, masyarakat Jabodetabek dapat dikatakan cukup toleran terhadap berbagai perbedaan. Bagi mereka bertetangga dengan orang yang beda agama atau beda suku sama sekali bukan merupakan persoalan yang terlalu serius. [Lihat Grafik 2]

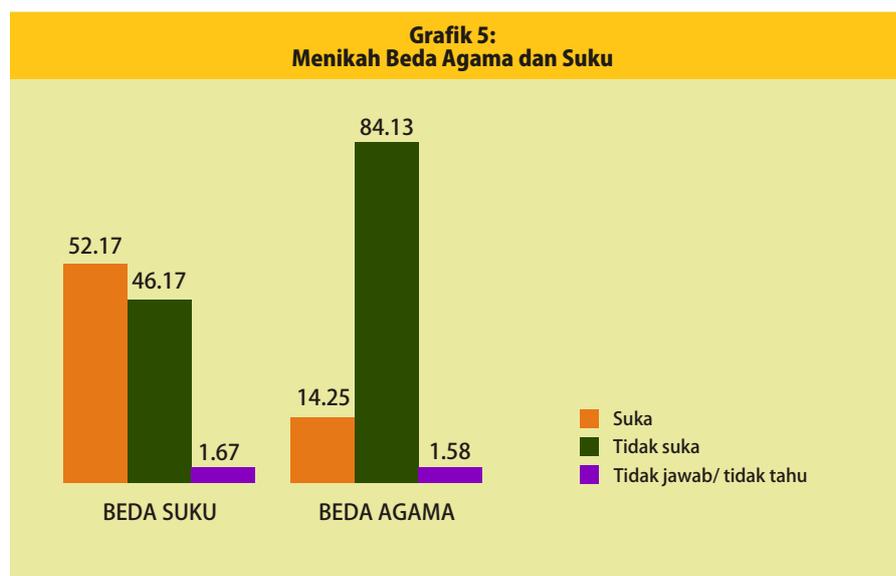


Sama halnya dengan sikap bertetangga, dalam memasuki kelompok sosial, perbedaan agama dan suku bangsa juga ditolerir oleh warga Jabodetabek. Dalam memasuki kelompok semacam itu, suku bangsa dan agama tampak tidak menjadi pertimbangan utama bagi warga Jabodetabek. Konsisten dengan sikap dalam bertetangga dan memasuki sebuah perkumpulan, warga Jabodetabek juga tampak cukup terbuka dan toleran dalam pergaulan sehari-hari. Bagi mereka, perbedaan agama bukan halangan bagi pertemanan. Dengan kata lain, kesamaan agama bukan merupakan pertimbangan utama masyarakat Jabodetabek dalam menjalin sebuah persahabatan atau pertemanan.



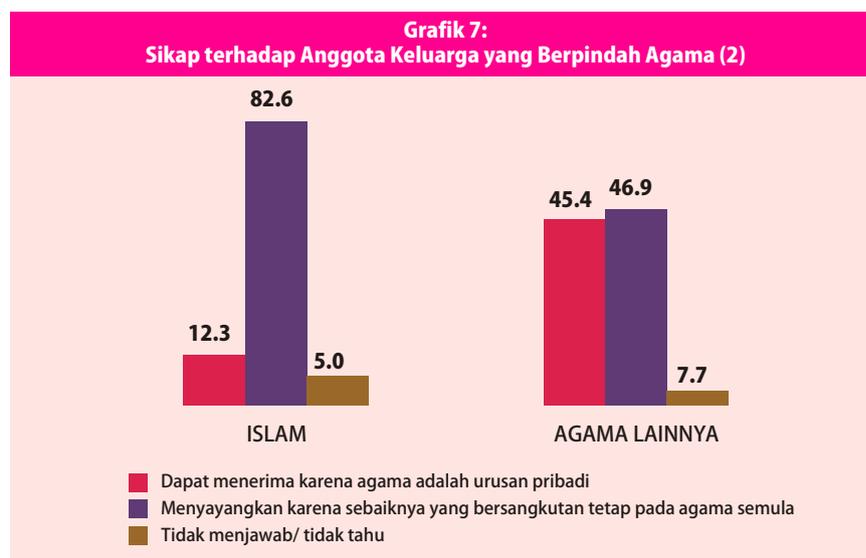
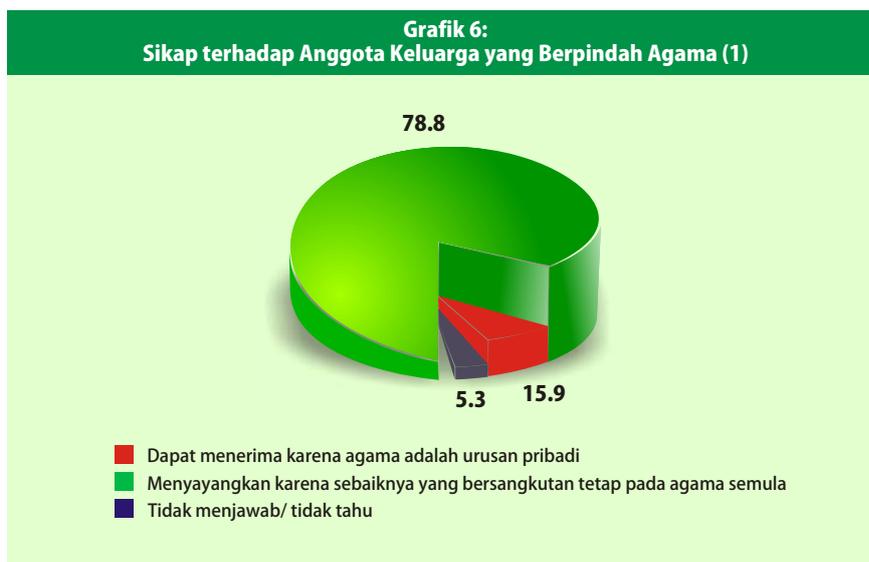
Berbeda dengan sikap dalam bertetangga, memasuki sebuah perkumpulan ataupun dalam berteman, warga Jabodetabek tampaknya menunjukkan sikap yang tidak terlalu longgar jika salah seorang keluarga terdekat mereka menikah dengan orang lain yang berbeda suku dan agama. Dalam kasus anggota keluarga terdekat yang menikah dengan orang yang beda suku, sikap warga Jabodetabek terbelah ke dalam dua pandangan yang sama besar. Sebagian dapat menerima hal itu, sementara sebagian lainnya cenderung menolak.

Sementara itu, untuk kasus anggota keluarga terdekat yang menikah dengan orang yang beda agama terlihat penolakan yang cukup kuat, melampaui penolakannya atas pernikahan beda suku. Hasil survey ini memperlihatkan bahwa warga Jabodetabek merasa sangat keberatan dengan adanya kemungkinan menikah beda agama. **[Lihat Grafik 5]**



Sama dengan sikap keberatan terhadap anggota keluarga yang menikah dengan orang yang beda agama, warga Jabodetabek juga merasa keberatan jika anggota keluarga dekat mereka pindah ke agama lain.

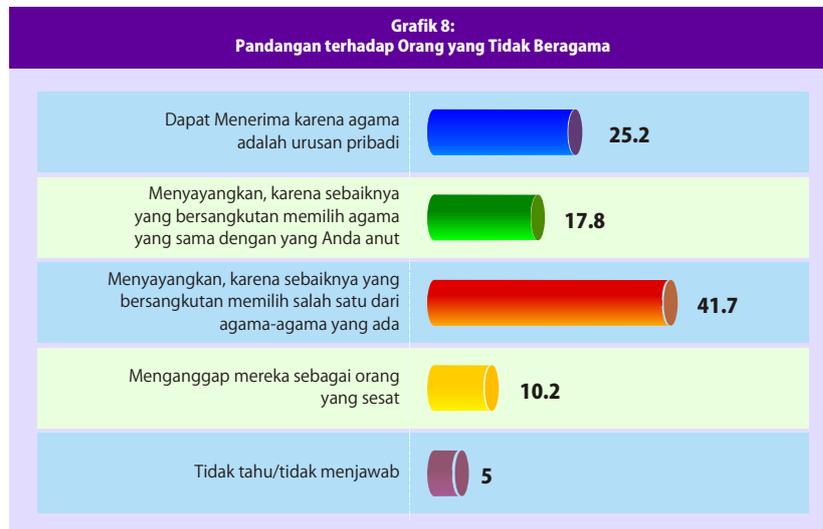
Dari temuan survey ini terlihat bahwa untuk perbedaan identitas dalam lingkup relasi sosial yang lebih luas (berorganisasi, bertetangga dan berteman) masyarakat Jabodetabek secara umum lebih memperlihatkan sikap toleran. Namun, dalam lingkup relasi yang lebih personal dan menyangkut keyakinan (anggota keluarga menikah dengan pemeluk agama lain atau pindah ke agama lain) sikap mereka cenderung kurang toleran. **[Lihat Grafik 6]**



**Grafik: 7** menunjukkan bahwa tingkat penolakan responden yang beragama Islam terhadap anggota keluarganya yang berpindah agama jauh lebih tinggi (82,6%) dari responden yang beragama lainnya. Sejumlah (45,4%) responden yang beragama selain Islam menyatakan dapat menerima perpindahan agama karena soal agama adalah urusan pribadi.

Selain pindah agama, untuk mengukur tingkat toleransi kepada responden juga ditanyakan tentang keberadaan yang tidak beragama. Terhadap pertanyaan ini, mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuannya. Hanya (25,2%) responden yang dapat menerima keberadaan orang yang tidak beragama, karena agama adalah urusan pribadi. Sedangkan yang menyatakan ketidaksetujuannya secara variatif memberikan tanggapan menyayangkan, karena sebaiknya seseorang memilih agama yang dianut responden (17,8%),

menyayangkan karena sebaiknya seseorang memilih salah satu agama dari agama-agama yang ada (41,7%), menganggap mereka sebagai orang-orang yang sesat (10,2%), dan sisanya (5%) tidak menjawab. **[Lihat Grafik 8]**



Singkatnya, tidak ada toleransi atas orang-orang yang tidak beragama. Tidak beragama masih dianggap sebagai sebuah tabu yang tidak ditolerir di negeri ini, bahkan di mata kaum urban Jabodetabek sekalipun. Dengan demikian, masyarakat Jabodetabek tidak dapat diidentikkan sepenuhnya dengan lazimnya perwatakan kaum urban dalam pengertian sosiologis.



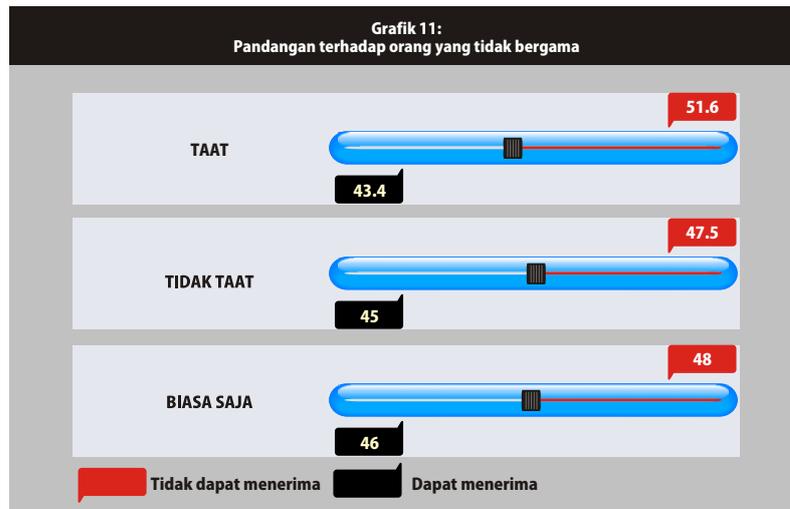
**Grafik: 9** menunjukkan secara umum wilayah tempat tinggal juga tidak memiliki perbedaan signifikan terhadap orang atau sekelompok orang yang tidak beragama. Hampir di semua wilayah terdapat kecenderungan untuk

menolak fenomena orang yang tidak beragama. Hanya di wilayah Jakarta Timur saja yang memperlihatkan tolakan yang tidak terlalu kuat.

Sehubungan dengan rumah ibadah, agama lain di lingkungan tempat tinggalnya, pandangan masyarakat tampaknya mengarah pada sikap keberatan, meskipun tidak sedikit pula dapat menerima. Namun demikian (49,5%) responden yang menyatakan tidak dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain merupakan angka yang sangat tinggi bagi bangsa yang secara sosiologis plural. Mereka yang dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain berjumlah (45%). Sisanya (5,5%) menyatakan tidak tahu/ menjawab. Dengan demikian, meski terlihat adanya toleransi, namun penerimaan adanya rumah ibadah agama lain itu dibayangi secara ketat dengan mereka yang menolaknya. **[Lihat Grafik 10]**



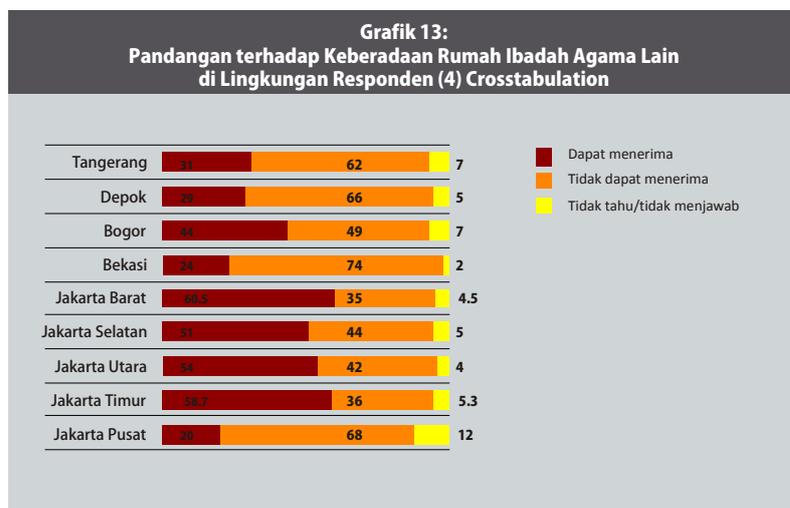
Meskipun pada semua tingkat ketaatan beragama menunjukkan kecenderungan sikap intoleran terhadap adanya rumah ibadah agama lain di dekat tempat tinggalnya, namun mereka yang mengaku taat tampak lebih memperlihatkan ekspresi penolakan yang cukup kuat dibandingkan dengan yang mengaku 'biasa saja' dan 'tidak taat'. Bagi responden yang beragama Islam, terlihat bahwa penolakan terhadap keberadaan rumah ibadah agama lain di sekitarnya cukup tinggi (54,1%). Sedangkan bagi agama lain tingkat penolakan cukup rendah (11,5%), yang dapat menerima (84,6%) sisanya (3,8%) tidak menjawab. **[Lihat Grafik 11]**



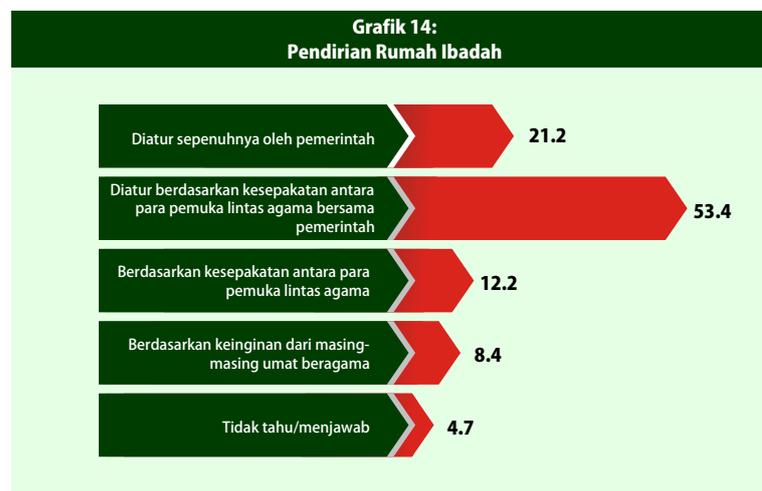
**Grafik 12:**  
Pandangan terhadap Keberadaan Rumah Ibadah Agama Lain di Lingkungan Responden (3) Crosstabulation

	Islam	Agama lainnya
Dapat menerima	40.2	84.6
Tidak dapat menerima	54.1	11.5
Tidak tahu/tidak menjawab	5.7	3.8
Total	100	100

Berdasarkan domisili responden terlihat bahwa penolakan atau keberatan terhadap adanya rumah ibadah agama lain terjadi di Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi dan Jakarta Pusat. Sementara itu, mereka yang cenderung dapat menerima fenomena tersebut terdapat di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. [lihat Grafik 13]



Terkait dengan pendirian rumah ibadah, sebagian besar masyarakat Jabodetabek menganggap hal itu bukan merupakan tugas eksklusif pemerintah semata ataupun para pemuka agama. Bagi warga Jabodetabek, pendirian rumah ibadah perlu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan para pemuka agama (53,4%). Sikap masyarakat ini tampak sejalan dengan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di mana unsur pemerintah dan masyarakat bergabung memutus soal pendirian rumah ibadah. Sekalipun keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang Pendirian Rumah Ibadah ini secara legal tetap diskriminatif, pola pengaturan yang demikian dianggap sebagai tempat menaruh harapan minimum untuk terciptanya toleransi. [lihat Grafik 14].



Namun demikian, tidak sedikit mereka yang berpandangan agar pendirian rumah ibadah diserahkan kepada masing-masing pemeluk agama atau tanpa campur tangan pemerintah. Sebanyak (12,2%) responden menjawab pendirian rumah ibadah sebaiknya diserahkan kepada kesepakatan para pemuka agama dan sebanyak (8,4%) diserahkan sepenuhnya kepada umat beragama masing-masing.

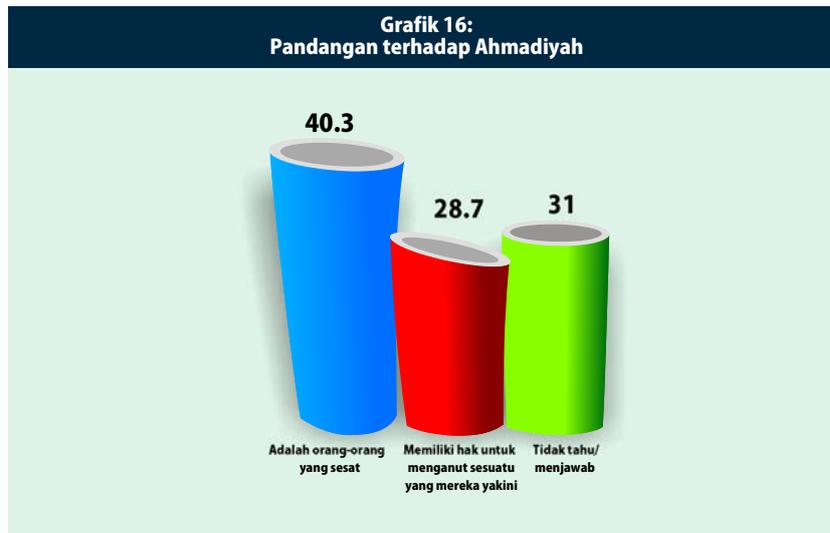
Sementara, terkait dengan pengakuan negara terhadap 6 agama/ keyakinan, mayoritas responden (60,9%) menyatakan tidak dapat menerima jika ada agama/ keyakinan lain selain 6 agama 'resmi' yang diakui oleh negara: Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sejumlah (29,8%) yang menyatakan dapat menerima, sisanya (9,2%) tidak tahu/ menjawab. Pandangan yang demikian sejalan dengan berbagai data pelanggaran kebebasan beragama yang menunjukkan intoleransi dan diskriminasi terhadap

warga negara yang menganggap sesat setiap agama/ keyakinan lain selain yang 'diakui'. [Lihat Grafik 15]



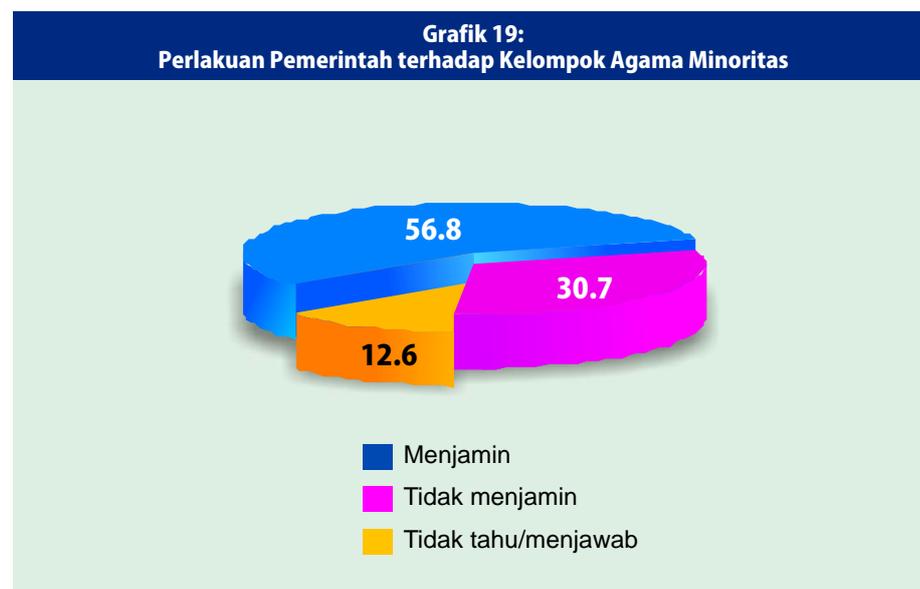
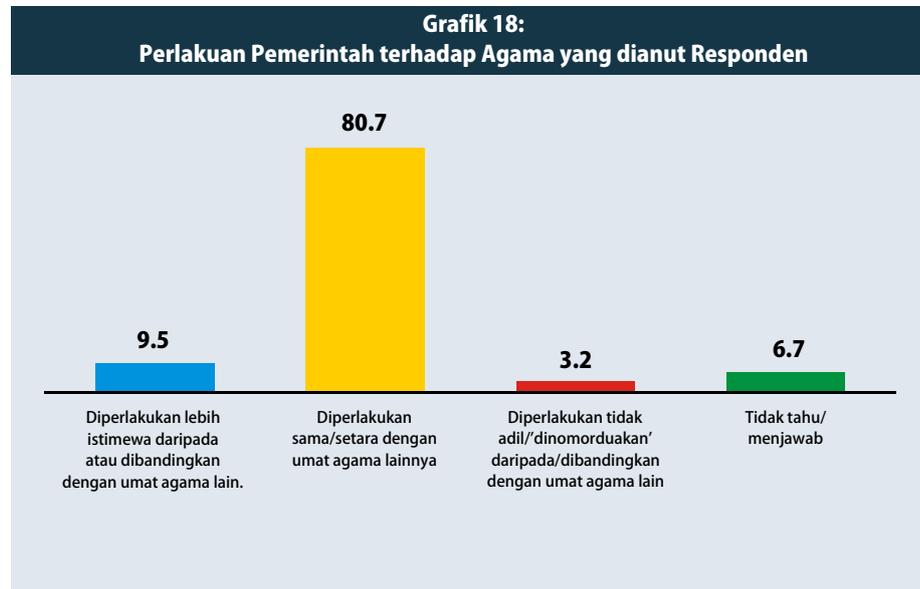
Sejalan dengan pandangannya terhadap agama/ keyakinan lain di luar 6 agama, responden juga berpandangan bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Sekalipun Ahmadiyah menurut pengakuan jemaatnya merupakan bagian dari Islam, tapi toleransi terhadap keberadaan jemaat Ahmadiyah cukup rendah, hanya (28,7%) responden yang berpendapat bahwa Ahmadiyah memiliki hak untuk menganut keyakinan yang mereka yakini. Sedangkan (40,3%) responden menganggap Ahmadiyah sesat. Di sisi lain, cukup banyak responden yang mayoritas muslim, juga tidak memberikan penilaian terhadap keberadaan Ahmadiyah (31%). Konsisten dengan pandangan di atas, terdapat (45,4%) responden yang berpandangan agar sebaiknya Ahmadiyah dibubarkan oleh pemerintah.

Namun demikian mereka yang berpandangan moderat juga cukup signifikan. Sejumlah (20,7%) berpendapat agar Ahmadiyah didiamkan saja (tidak perlu dibubarkan) tapi dibatasi perkembangannya. Sejumlah (6,1%) bahkan berpandangan Ahmadiyah harus dijamin keberadaannya. Sisanya (27,8) tidak memberikan penilaian. 'Kampanye' pembubaran Ahmadiyah yang dilakukan oleh Menteri Agama RI dan keberadaan SKB Pembatasan Ahmadiyah kemungkinan besar memberikan kontribusi signifikan dalam mengkonstruksi pendapat masyarakat. [Lihat Grafik 16 & 17]



Terhadap agama yang dianutnya, mayoritas responden menganggap bahwa selama ini pemerintah telah memperlakukan sama/ setara dengan agama lainnya (80,7%). Sejumlah (9,5%) yang menganggap pemerintah mengistimewakan agama yang dianut responden. Sedangkan yang merasa agamanya masih diperlakukan tidak adil sebanyak (3,2%). Sisanya (6,7%) tidak menjawab. **[Lihat Grafik 18].**

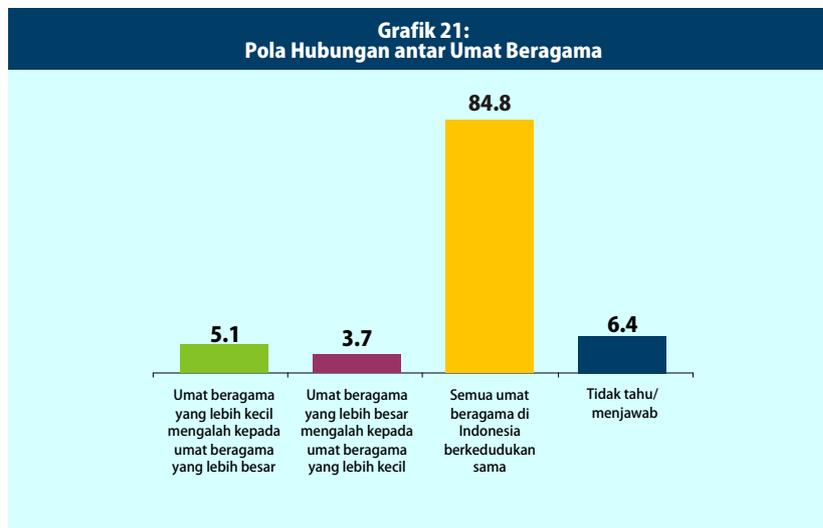
Namun demikian, terkait perlakuan pemerintah terhadap kelompok minoritas agama oleh responden dinilai masih belum menjamin (30,7%), telah menjamin (56,8%), dan sisanya (12,6%) tidak menjawab. **[Lihat Grafik 19]**

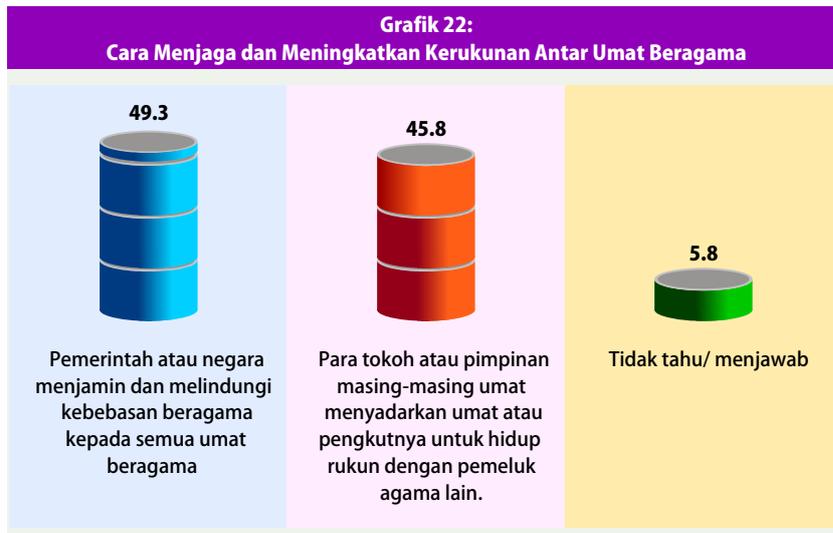


Dalam mengambil posisi terhadap negara dan keyakinan agama, warga Jabodetabek agaknya relatif *clear cut*. Masyarakat berpandangan bahwa masalah keyakinan agama bukan merupakan domain negara. Keyakinan agama, bagi mereka, merupakan urusan yang sepenuhnya pribadi yang tidak dapat dicampuri/ diintervensi oleh pihak manapun. [Lihat Grafik 20]. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali negara menjamin setiap agama dan keyakinan.



Sejalan dengan pandangan di atas, pandangan masyarakat terkait dengan pola hubungan antar umat beragama, mayoritas responden (84,8) berpendapat setiap umat beragama seharusnya memperlakukan semua umat beragama memiliki kedudukan yang sama. [Lihat Grafik 21]

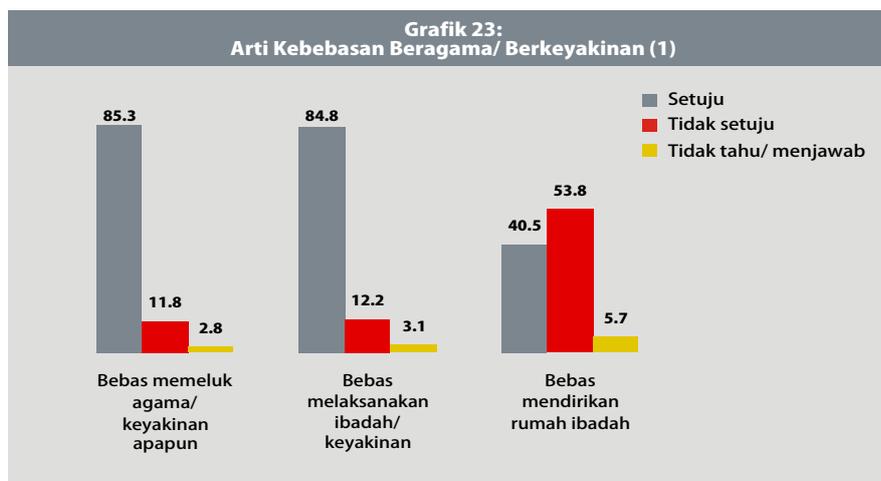




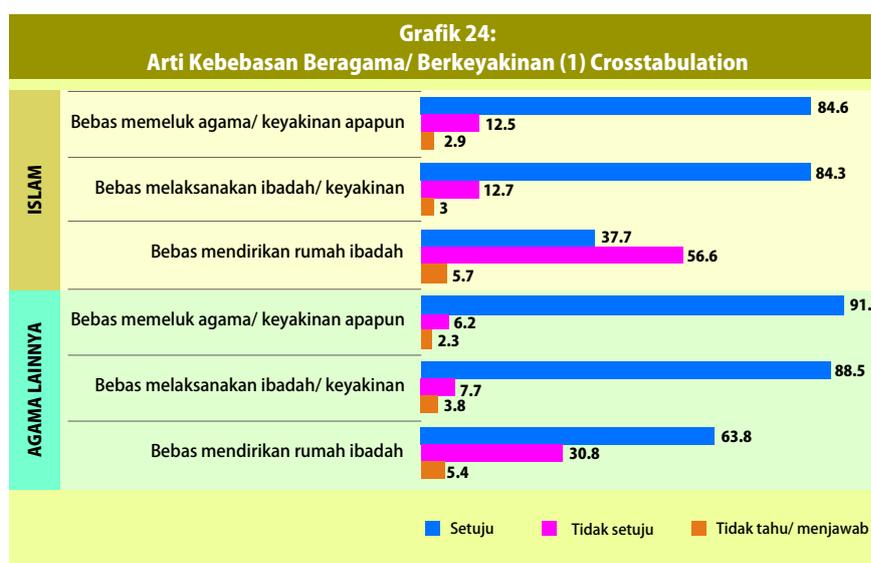
Dalam **Grafik 22** di atas terlihat bahwa untuk menjamin kerukunan setidaknya ada dua cara dan dengan peran yang berbeda: meskipun publik beranggapan bahwa peran para tokoh agama cukup penting dalam menyadarkan masing-masing umatnya untuk hidup rukun dengan berbagai umat lain, namun di mata mereka, kunci utama bagi kerukunan antar umat beragama di Indonesia di mata warga Jabodetabek tetap berada di tangan negara. Bagi masyarakat Jabodetabek, adanya jaminan negara untuk melindungi kebebasan beragama tanpa diskriminasi merupakan prinsip dasar bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama di tanah air. Jadi peran negara bukanlah mendesain kerukunan tapi menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan. Sedangkan desain kerukunan tetap menjadi domain para tokoh agama dan masyarakat.

Terkait dengan pandangan responden terhadap arti kebebasan beragama, mayoritas responden cenderung menunjukkan sikap intoleran. Bagi warga Jabodetabek kebebasan beragama sekurang-kurangnya memiliki dua pengertian positif, yakni: bebas memeluk agama/ keyakinan apapun dan bebas menjalankan ibadah. Namun, kebebasan beragama, bagi sebagian besar masyarakat Jabodetabek, tidak identik dengan bebas mendirikan tempat ibadah.

Kecenderungan pandangan terhadap pendirian tempat ibadah ini tampak konsisten dengan sikap sebelumnya di mana mereka umumnya merasa keberatan dengan adanya rumah ibadah dari umat lain, serta harapan mereka tentang perlunya para pimpinan umat dan pemerintah untuk duduk bersama dalam menentukan pendirian tempat ibadah. **[Lihat Grafik 23]**



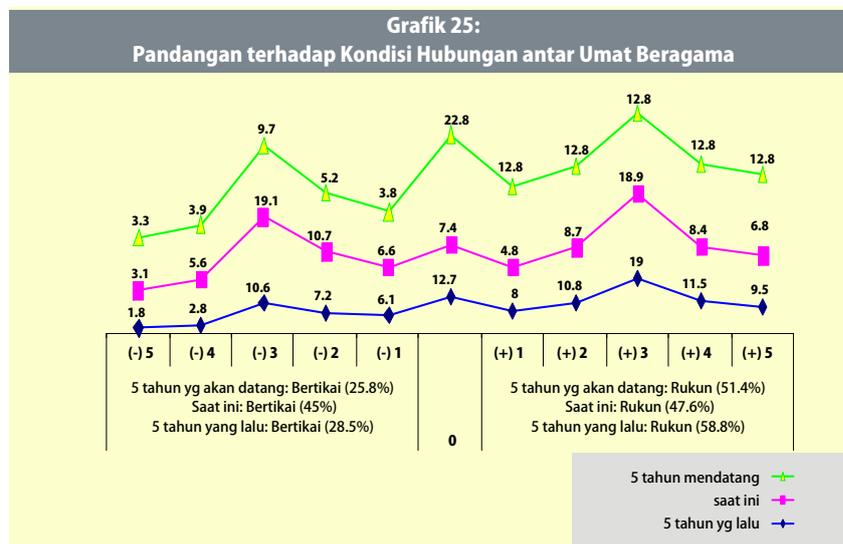
Kebebasan beragama/ berkeyakinan disepakati oleh sebagian besar responden sebagai jaminan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah/ keyakinan yang diyakininya. Sedangkan terkait dengan kebebasan mendirikan rumah ibadah, sebagian besar responden yang beragama Islam menyatakan ketidaksetujuannya (56,6%). Namun demikian, mereka yang menyetujui tafsir ini juga cukup besar (37,7%). Sebaliknya bagi responden yang beragama selain Islam, persetujuan terhadap arti kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai bebas mendirikan rumah ibadah menunjukkan dukungan yang cukup besar (63,8%). Sejumlah (30,8%) tidak menyetujui, dan sisanya (5,4%) tidak menjawab. Konfigurasi pandangan responden bisa jadi merujuk pada pengalaman kesulitan mendirikan rumah ibadah bagi agama selain Islam, yang selama ini sering menghadapi tantangan dalam pendirian rumah ibadah. **[Lihat Grafik 24]**



## 2.2. Konflik dan Kekerasan

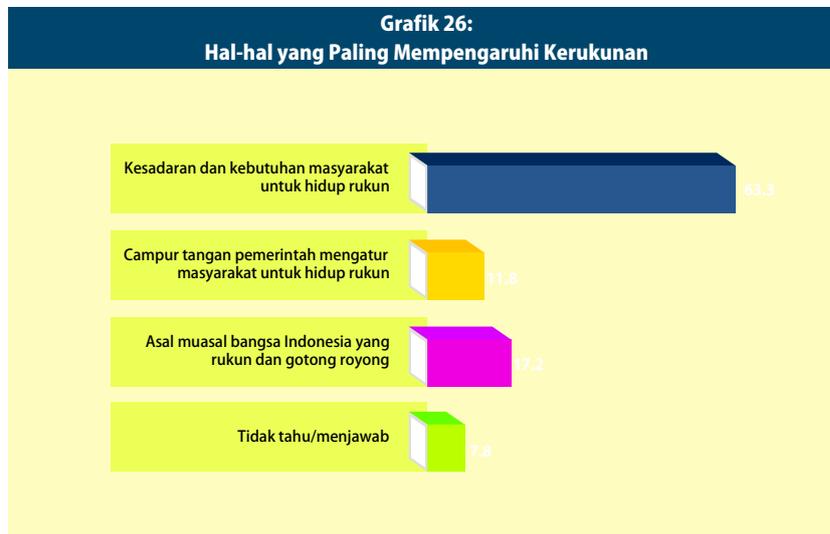
Kondisi hubungan antar umat beragama saat ini di tanah air, di mata warga Jabodetabek, berada pada situasi yang cukup pelik di mana tarikan ke arah pertikaian dan tarikan ke arah kerukunan relatif sama besar. Gambaran ini jelas merupakan kemunduran dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu di mana kondisi hubungan antar umat beragama dianggap jauh lebih rukun dengan sedikit pertikaian. Berbagai peristiwa mutakhir terkait intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama dimungkinkan telah berkontribusi membentuk persepsi publik dalam menilai situasi mutakhir kondisi hubungan antar umat beragama.

Namun demikian, untuk 5 tahun mendatang kondisi hubungan antar umat beragama di tanah air menunjukkan tanda-tanda positif dan memberikan harapan yang lebih baik di mana tarikan ke arah pertikaian lebih rendah dibandingkan dengan tarikan yang mengarah pada kerukunan. Pilihan jawaban responden terhadap situasi mendatang merupakan bentuk harapan yang diletakkan pada pemerintah untuk dapat mengambil sikap tegas terhadap kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan yang saat ini berpotensi memicu pertikaian. [lihat Grafik 25]



Dalam pandangan warga Jabodetabek, kesadaran dan kebutuhan untuk hidup rukun antar sesama pemeluk agama merupakan kunci utama bagi terwujudnya kerukunan umat beragama. Sementara itu, peran pemerintah dalam hal ini hanya didukung oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Dengan kata lain, warga Jabodetabek agaknya kurang menaruh harapan yang terlalu

besar kepada pemerintah untuk mengambil peran dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. [lihat Grafik 26]



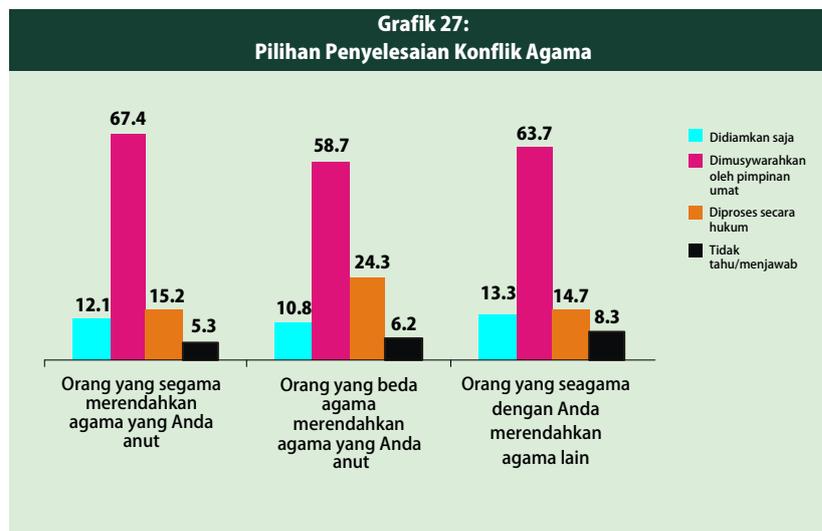
Cara pandang masyarakat yang demikian semakin menegaskan pandangan bahwa kerukunan bukanlah desain negara yang 'dipaksakan' kepada warga negara. Kerukunan otentik akan tercipta manakala masyarakat telah tumbuh kesadaran dan kebutuhannya atas kerukunan itu sendiri. Pendapat responden sejalan dengan pandangan yang digariskan oleh disiplin hak asasi manusia, di mana dalam implementasi hak-hak sipil, negara dituntut menjamin hak tersebut tanpa mengintervensi realisasi hak tersebut.

Gagasan RUU Kerukunan Umat Beragama yang direncanakan oleh pemerintah tampaknya kurang diafirmasi oleh temuan survey ini. Karena dengan cara pandang sebagaimana dikemukakan oleh responden, justru RUU Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan yang dibutuhkan. Dengan adanya jaminan kepada setiap warga negara, didukung oleh kesadaran akan fakta-fakta perbedaan, dan didorong oleh kebutuhan hidup untuk rukun, maka kerukunan otentik akan dapat diciptakan.

Sejalan dengan pandangan di atas, di mana otonomi masyarakat dalam menjalankan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang perlu dijunjung tinggi, fenomena hujat-menghujat dalam agama umumnya dianggap sensitif dan dapat menjadi pemicu munculnya konflik, tidak saja antar umat beragama tetapi juga di dalam suatu umat beragama. Cukup menarik bahwa fenomena semacam itu ternyata tidak menjadikan warga Jabodetabek mudah terprovokasi untuk bersikap reaktif.

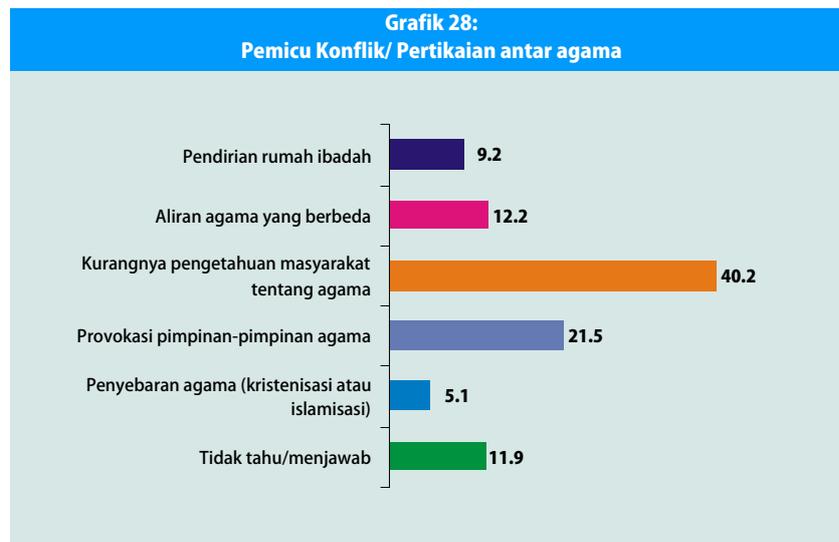
Meskipun mereka pada umumnya tidak berada pada posisi yang dapat menerima begitu saja (tanpa *reserve*) atas fenomena semacam itu, namun sebagian besar lebih memilih opsi musyawarah antar pemuka agama untuk mencari solusi atas persoalan itu daripada membawa ke meja hijau.

Fakta ini memperlihatkan kuatnya orientasi masyarakat Jabodetabek terhadap keberadaan tokoh/ pimpinan agama. Dalam penanganan terhadap kasus hujat-menghujat pilihan masyarakat lebih terarah pada tokoh/ pimpinan agama, sementara jalur hukum agaknya belum menjadi opsi utama. **[Lihat Grafik 27]**

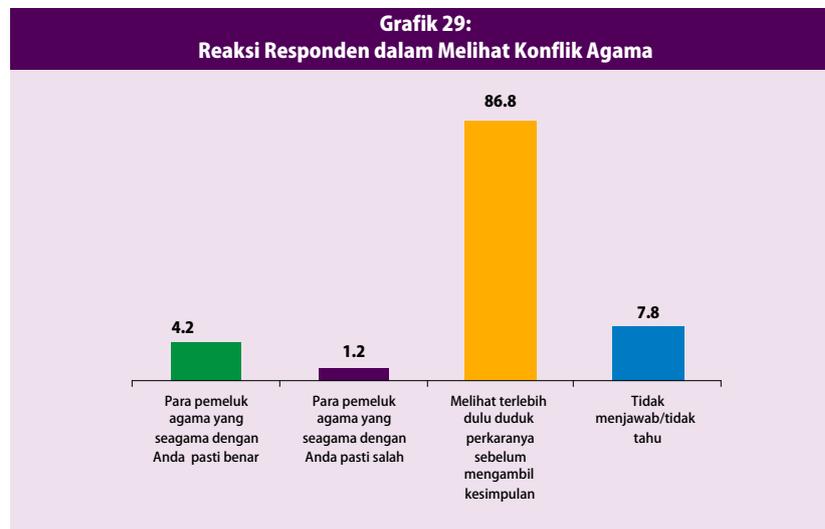


Di mata warga Jabodetabek, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agama yang dianut dipandang merupakan pemicu utama pertikaian antar umat beragama (40,2%). Cukup menarik bahwa provokasi dari pimpinan umat beragama (21,5) dianggap merupakan faktor berikutnya yang memicu pertikaian antar umat beragama.

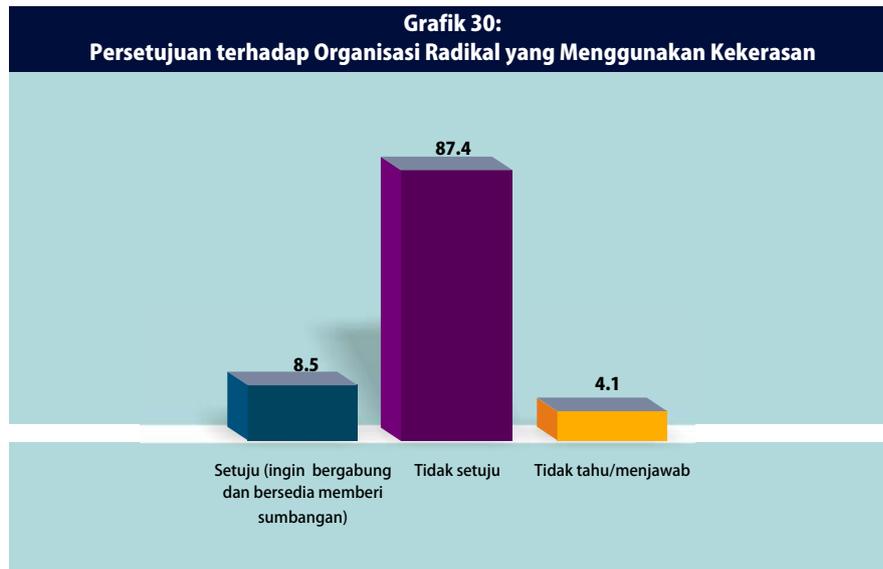
Masyarakat tidak terlalu percaya bahwa pertikaian antar umat beragama dipicu oleh ekspansi dan penyebaran agama/ keyakinan tertentu terhadap masyarakat yang sudah berkeyakinan, misalnya 'Kristenisasi' atau 'Islamisasi'. Namun demikian tetap ada yang berpandangan demikian. Setidaknya (5,1%) responden meyakini bahwa isu kristenisasi atau islamisasi adalah pemicu konflik. Pemicu lainnya adalah terkait pendirian rumah ibadah (9,2%) dan aliran agama yang berbeda (12,2%), dan sisanya (11,9%) tidak menjawab. **[lihat Grafik 28]**



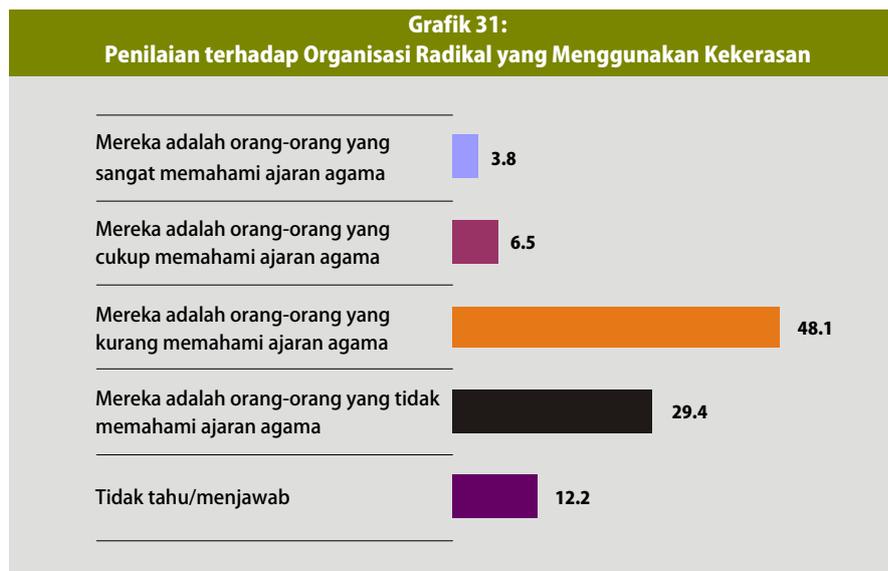
Dalam melihat konflik antara umat beragama, masyarakat Jabodetabek tampaknya tidak mudah terprovokasi untuk ‘membela’ atau membenarkan kelompok agama yang mereka anut. Setidaknya, mereka akan terlebih dulu ‘mengamati’ apa yang menjadi penyebab konflik semacam itu sebelum mengambil kesimpulan final. **[Lihat Grafik 29]**



Terhadap keberadaan organisasi-organisasi radikal yang memperjuangkan tujuan organisasinya dengan menggunakan kekerasan, mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuannya (87,4%). Namun demikian, terdapat (8,5%) responden yang menyatakan persetujuannya bahkan ingin bergabung. Sisanya (4,1%) tidak menjawab. Selain mengafirmasi keberadaan organisasi-organisasi radikal, responden tetap menyatakan menolak aksi-aksi kekerasan ini. **[Lihat Grafik 30]**

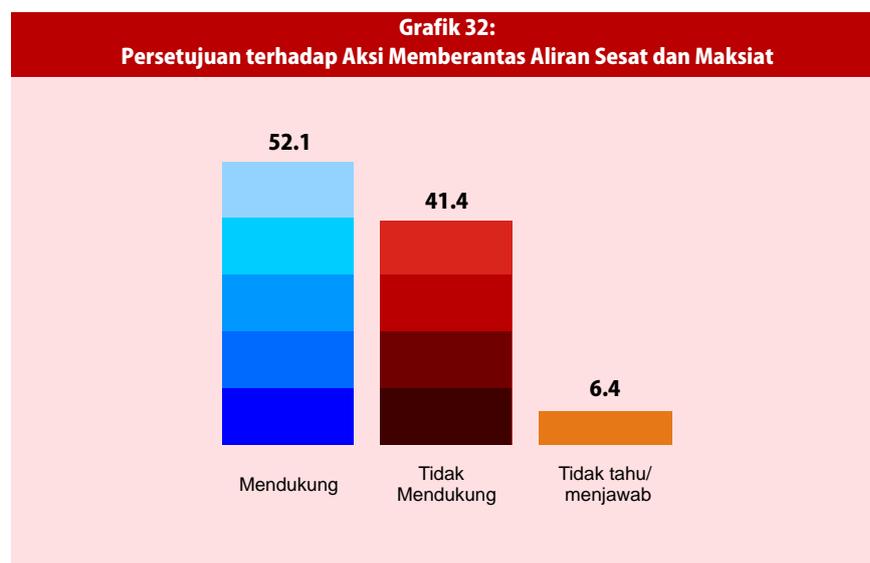


Bertentangan dengan klaim para pendukung gerakan agama yang memperjuangkan kekerasan bahwa aksi-aksi mereka didasarkan atas ‘pemahaman agama yang tuntas’, sebagian besar warga Jabodetabek beranggapan bahwa aksi kekerasan dari berbagai kelompok radikal justru memperlihatkan bahwa mereka pada dasarnya tidak memahami ajaran agama yang sesungguhnya. Secara implisit pandangan masyarakat ini dapat dimaknai bahwa agama pada dasarnya tidak melegitimasi atau membenarkan aksi kekerasan. [Lihat Grafik 31]



Meskipun sebagian besar warga masyarakat menolak cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan agama, namun mereka menyatakan persetujuannya

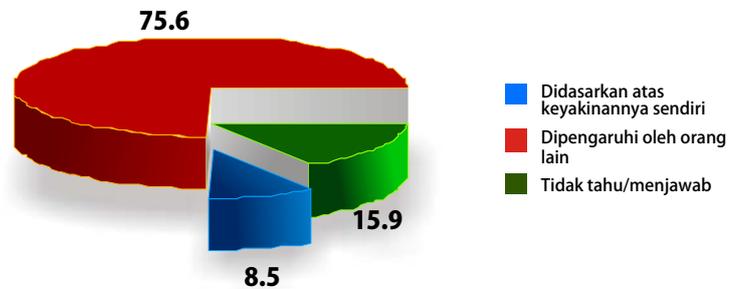
terhadap aksi-aksi organisasi tertentu yang memberantas ‘aliran sesat’ dan kemaksiatan (52,1%). Namun demikian, mereka yang menyatakan tidak setuju juga signifikan (41,4%). Sebagian masyarakat sekalipun mungkin tidak setuju dengan aliran sesat dan maksiat, tapi tetap menolak cara main hakim sendiri, meski tanpa kekerasan. Apapun alasannya aksi kelompok *vigilante* (main hakim sendiri) tetap tidak mendapat tempat dalam pandangan responden. **[Lihat Grafik 32]**



Di mata masyarakat, tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh kaum muda, sebagaimana yang terjadi belakangan ini, bukan merupakan dorongan yang datang atas dasar keyakinan sendiri. Dorongan untuk melakukan kekerasan atas nama agama justru berasal dari luar diri para pelaku.

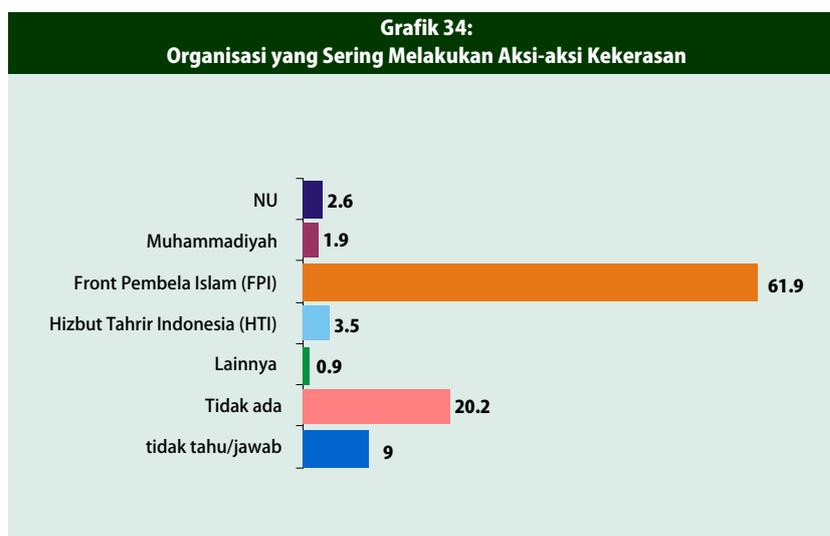
Temuan ini tampak sejalan temuan survey sebelumnya terkait dengan pola-pola sosialisasi ajaran agama yang umumnya dilakukan di lingkungan keluarga, dan oleh karenanya, lebih membentuk watak dan sikap keagamaan yang relatif lebih moderat. Ini berarti bahwa sosialisasi nilai-nilai agama di luar ‘metoda’ *mainstream*, setidaknya di mata masyarakat Jabodetabek, berpotensi melahirkan radikalisme di kalangan kaum muda. Temuan ini juga menegaskan bahwa kaum muda adalah sasaran radikalisasi oleh kelompok-kelompok organisasi radikal tertentu. **[Lihat Grafik 33]**

**Grafik 33:**  
**Alasan Generasi Muda Terlibat Melakukan Aksi Kekerasan Atas Nama Agama**

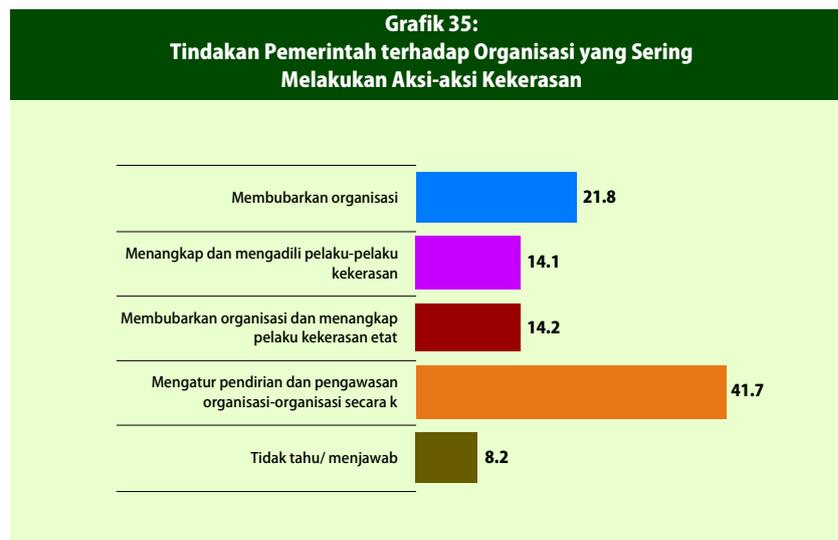


Di mata warga Jabodetabek, dibandingkan dengan organisasi Islam lainnya, Front Pembela Islam (FPI) dinilai sebagai organisasi keagamaan yang paling sering melakukan kekerasan. Terdapat (61,9%) responden yang menyebut FPI sebagai aktor utama. Berikutnya (3,5%) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), (2,6%) Nahdlatul Ulama (NU), (1,9%) Muhammadiyah. Sejumlah (20,2%) menyebut tidak ada, dan (9%) tidak menjawab. Organisasi lainnya hanya disebut oleh (0,9%). [lihat Grafik 34]

Meskipun secara faktual jarang melakukan aksi sendiri, keterlibatan organisasi semacam HTI, NU, dan Muhammadiyah dalam melakukan aksi kekerasan bisa jadi dikonstruksi oleh keberadaan organisasi-organisasi ini yang seringkali menggabungkan diri dalam organ yang disebut Forum Umat Islam (FUI), sebuah forum gabungan ormas-ormas Islam.



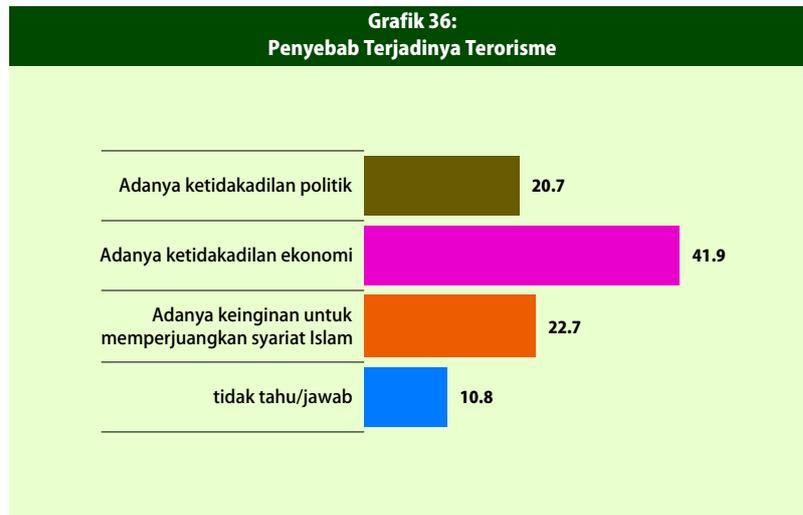
Terkait dengan tindakan yang harus diambil terhadap organisasi pelaku kekerasan, sebagian besar masyarakat menyarankan agar pemerintah memperketat syarat-syarat pendirian organisasi. Usulan atau saran berikutnya secara berturut-turut adalah membubarkan organisasi yang melakukan kekerasan, menangkap dan mengadili para pelaku kekerasan, serta membubarkan organisasi dan menangkap para pelaku. **[Lihat Grafik 35]**



### 2.3. Terorisme

Bagi sebagian besar masyarakat (41,9%), penyebab utama berkembangnya terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, yang utama bukanlah terletak pada adanya cita-cita untuk memperjuangkan Syariat Islam. Berkembangnya terorisme di Tanah Air, di mata sebagian besar warga Jabodetabek, dilatarbelakangi oleh ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik. **[Lihat Grafik 36]**

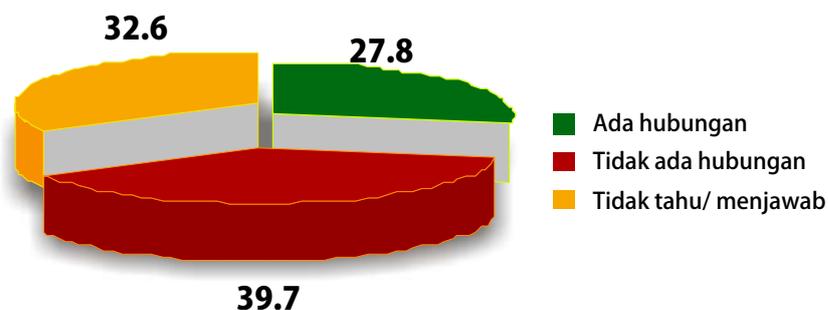
Temuan survey ini secara eksplisit meragukan berbagai ekspos perkara terorisme yang seringkali dihubungkan semata-mata dengan perjuangan mendirikan negara Islam. Namun demikian, mereka yang berpandangan bahwa penyebab utama adalah motivasi mendirikan negara Islam juga cukup signifikan (22,7%). Alasan berikutnya adalah adanya ketidakadilan politik (20,7%), sisanya (10,8%) tidak menjawab.

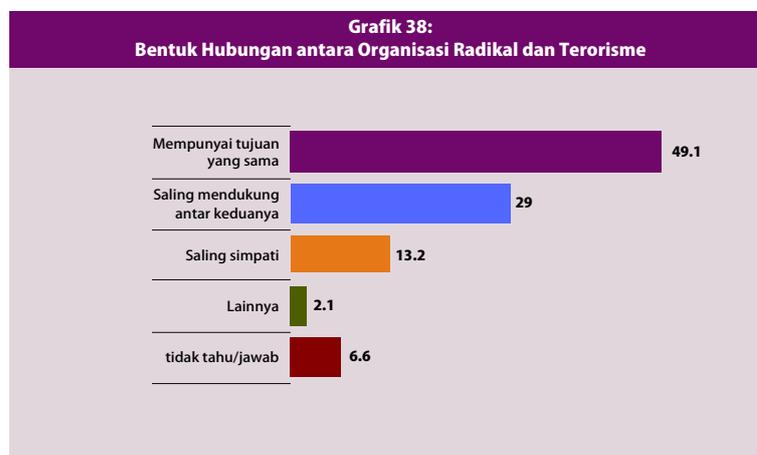


Dalam memberikan penilaian tentang sejauhmana terdapat hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal di tanah air terlihat bahwa lebih banyak anggota masyarakat yang memberikan pernyataan negatif. Dengan kata lain, bagian terbesar masyarakat (39,7%) agaknya tidak melihat adanya hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal. Namun demikian, terdapat (27,8%) yang menyatakan bahwa keduanya memiliki hubungan. Sedangkan (32,6%) menjawab tidak tahu. [**Lihat Grafik 37**]

Meskipun lebih banyak anggota masyarakat yang tidak melihat hubungan langsung antara terorisme dengan organisasi agama radikal, namun mereka beranggapan bahwa kedua entitas itu memiliki tujuan yang sama. Bahkan, meski dengan prosentase yang lebih kecil, ada pula yang menganggap bahwa di antara keduanya terjadi saling dukung dan saling simpati. [**Lihat Grafik 38**]

**Grafik 37:**  
**Hubungan antara Organisasi Radikal dan Terorisme**

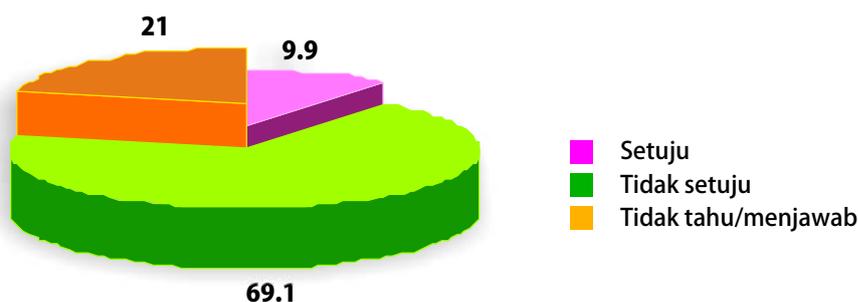




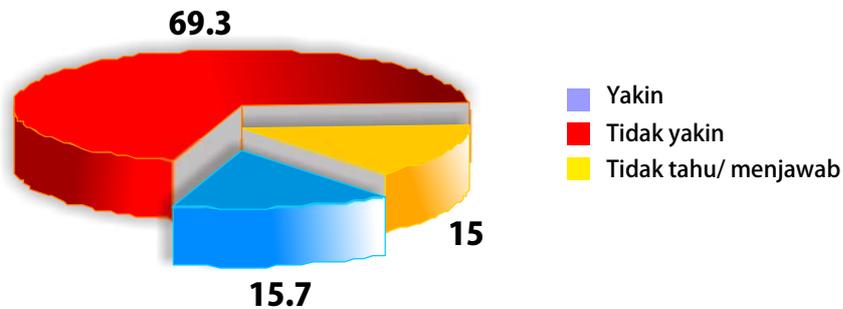
Terkait pendapat sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa terorisme adalah rekayasa pemerintah, sebagian besar responden menyatakan tidak setuju (69,1%), menyatakan setuju (9,9%), dan sisanya (21%) menyatakan tidak tahu. Ekspose penanganan kasus-kasus terorisme termasuk efek kekerasan yang ditimbulkan dari sejumlah peristiwa telah kemungkinan telah berhasil meyakinkan publik bahwa terorisme adalah nyata dan bukan rekayasa negara. **[Lihat Grafik 39]**

Demikian juga, responden tidak cukup yakin bahwa aksi-aksi terorisme dilakukan oleh agama tertentu sebagai jalan menegakkan agama (jihad). Konsisten dengan pendapat tentang penyebab terjadinya terorisme, sebagian besar masyarakat tidak yakin bahwa terorisme dilakukan oleh pemeluk agama tertentu dan dalam rangka memperjuangkan agama (69,3%). Sementara yang meyakini bahwa terorisme dilakukan oleh kelompok agama tertentu terdapat (15,7%) responden. Sisanya (15%) tidak menjawab. **[Lihat Grafik 40]**

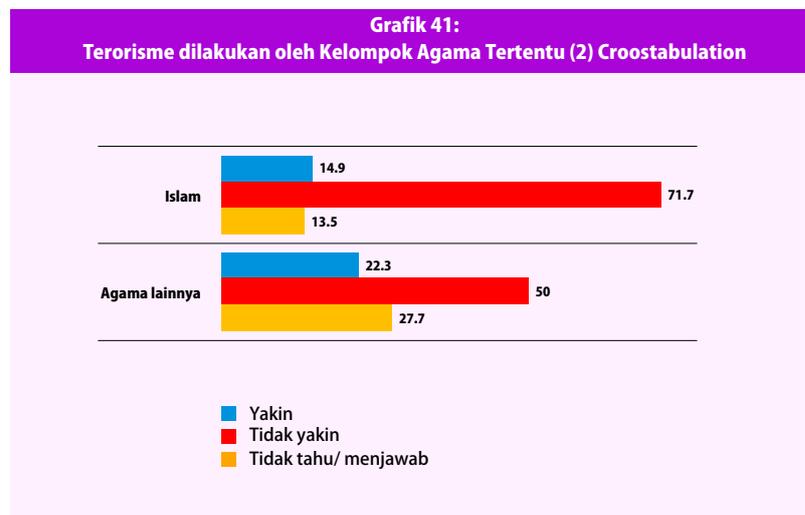
**Grafik 39:**  
**Pandangan terhadap Terorisme sebagai Rekayasa**



**Grafik 40:**  
**Terorisme dilakukan oleh Kelompok Agama Tertentu (1)**



Ketidakyakinan bahwa kelompok agama tertentu berada di balik aksi-aksi terorisme juga didukung oleh sebagian besar responden baik responden yang beragama Islam maupun yang beragama selain Islam. Temuan survey ini menegaskan bahwa agama tertentu tidak berada di balik aksi-aksi terorisme. [Lihat Grafik 41]

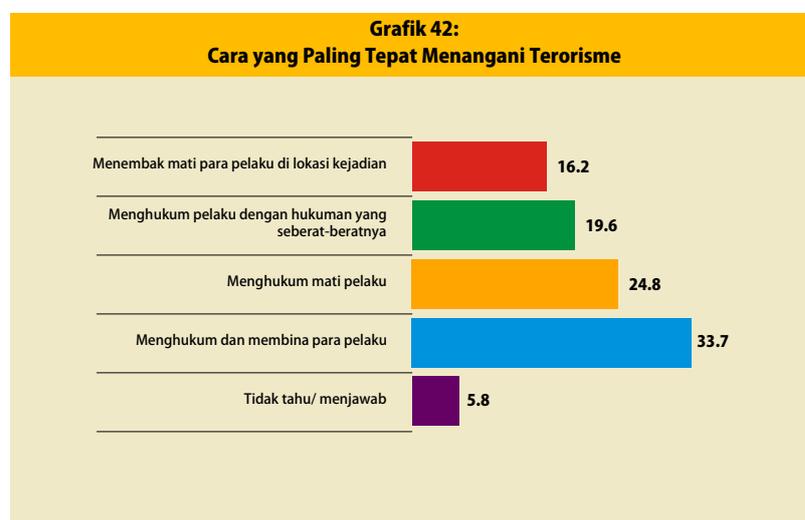


Cara apakah yang dianggap paling tepat untuk menangani pelaku terorisme? Menanggapi pertanyaan ini sikap masyarakat tampak bervariasi. Bagian terbesar mengusulkan agar para teroris dihukum dan bina (33,7%). Berikutnya berturut-turut mengusulkan hukuman mati (24,8%), menghukum pelaku seberat-beratnya (19,6%) dan menembak mati pelaku di tempat (16,2%).

Sekalipun jawaban responden terhadap cara penanganan pelaku terorisme beragam, tapi prioritas tetap menunjuk agar pelaku terorisme dihukum dan dibina. Tidak cukup hanya dihukum. Pembinaan dalam bentuk deradikalisasi

juga mutlak dilakukan untuk menghindari keberulangan di masa yang akan datang. Namun demikian, karena terorisme tidak melulu dipicu oleh paham keagamaan yang keliru, deradikalisasi tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan keagamaan.

Sementara terkait dengan dukungan hukuman mati bagi para pelaku yang cukup besar bisa jadi dikonstruksi oleh pemahaman responden tentang tingkat keberbahayaan terorisme sehingga perlu ditembak mati di lokasi kejadian dan dikonstruksi pula oleh hukum positif Indonesia yang masih mengadopsi hukuman mati, dan bahkan telah menjatuhkan vonis dan eksekusi mati untuk para pelaku terorisme. **[Lihat Grafik 42]**

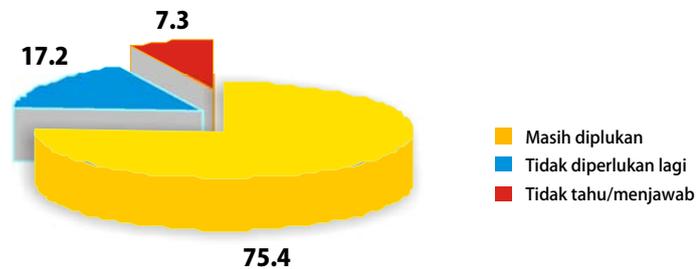


#### 2.4. Pancasila

Banyak kalangan menilai bahwa saat ini, sekalipun Pancasila merupakan dasar negara tapi tidak banyak para penyelenggara yang patuh pada lima sila dalam Pancasila. Sejak 5 tahun terakhir upaya merevitalisasi, merejuvenasi nilai-nilai Pancasila dilakukan banyak pihak, termasuk yang terakhir adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mensosialisasikan 4 Pilar Hidup Berbangsa: Pancasila, UUD Negara RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

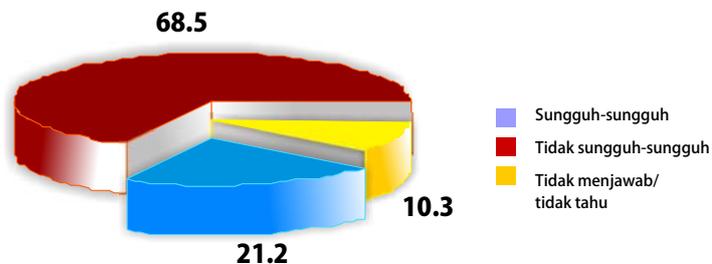
Terkait dengan Pancasila, survey ini meyakinkan bahwa mayoritas responden tetap menganggap perlu Pancasila (75,4%). Sedangkan (17,2%) diantaranya menganggap tidak perlu. Sisanya tidak tahu/ menjawab. **[Lihat Grafik 43]**

**Grafik 43:**  
**Urgensi Pancasila**

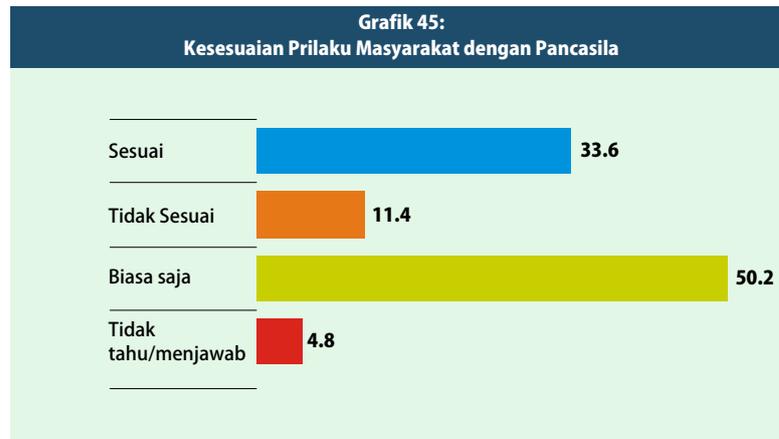


Pandangan responden terhadap urgensi Pancasila bisa jadi dipicu oleh kekecewaan terhadap praktik penyelenggaraan negara yang dinilai tidak lagi sungguh-sungguh sesuai dengan Pancasila. Jikapun mayoritas responden menganggap perlu dengan Pancasila, bisa jadi hanya sebatas simbol belaka. Buktinya mereka menilai bahwa penyelenggara negara tidak sungguh-sungguh menjalankan Pancasila (68,5%). Hanya (21,2%) yang menyatakan penyelenggara sungguh-sungguh menjalankan Pancasila. Sisanya (10,3%) tidak tahu/ menjawab. **[Lihat Grafik 44]**

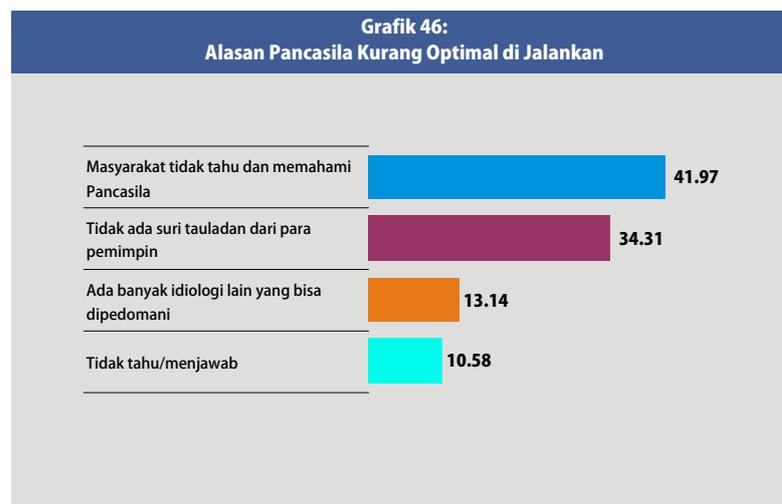
**Grafik 44:**  
**Kesungguhan Penyelenggara Negara dalam Menjalankan Pancasila**



Bila terhadap penyelenggara negara mereka menganggap tidak sungguh-sungguh, terhadap masyarakat pada umumnya, mayoritas responden (50,2%) menganggap bahwa perilaku masyarakat 'biasa saja' dengan Pancasila. Artinya dia bukan menjadi acuan utama berperilaku; bukan juga acuan yang diabaikan. Hanya (33,6%) yang menganggap bahwa perilaku masyarakat telah sesuai dengan Pancasila, (11,4%) menyatakan tidak sesuai, dan sisanya (4,8%) menyatakan tidak tahu. **[Lihat Grafik 45]**

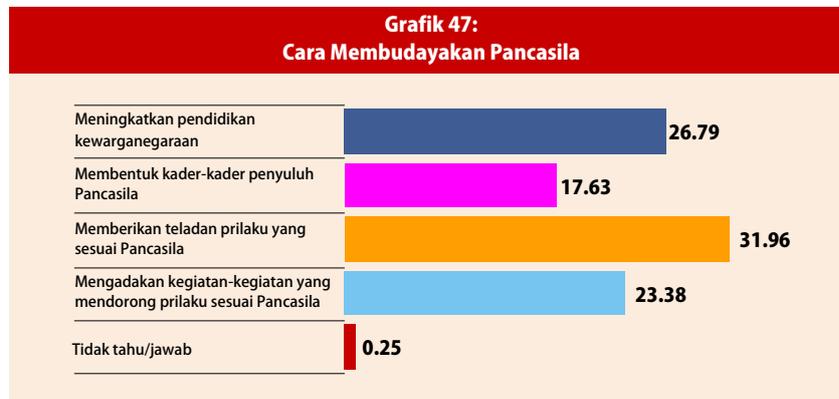


Krisis kepatuhan pada Pancasila baik di kalangan penyelenggara negara maupun di tingkat masyarakat disebabkan karena pada umumnya masyarakat tidak tahu atau tidak memahami bagaimana Pancasila harus diterapkan. Setidaknya sebagian besar masyarakat berpendapat demikian (41,97%). Sebagaimana diketahui, pasca 1998, Pancasila menjadi sasaran kemarahan publik atas praktik penyelenggaraan pemerintahan di masa Orde Baru. Yang menarik adalah penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa kurang optimalnya pengamalan Pancasila di sebabkan tidak adanya suri tauladan dari para penyelenggara negara (34,31%). Berikutnya berpendapat adanya idiologi lain yang bisa dipedomani telah mengurangi pengamalan Pancasila (13,14%). Sisanya (10,58%) menyatakan tidak tahu/ menjawab. [Lihat Grafik 46]



Dalam rangka meningkatkan pengamalan Pancasila, terdapat beberapa cara yang direkomendasikan responden dalam survey ini, yaitu: memberikan teladan prilaku yang sesuai dengan Pancasila (30,06%), meningkatkan pendidikan kwanegaraan (26,79%), mengadakan kegiatan-kegiatan yang

mendorong perilaku sesuai Pancasila (23,38%), dan membentuk kader-kader penyuluh Pancasila (17,63%). Sisanya (0,25%) tidak menjawab. [Lihat Grafik 47]

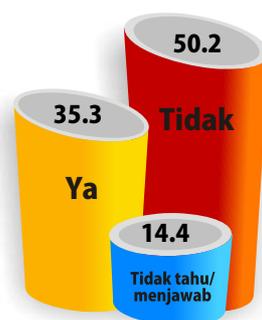


## 2.5. Hukum Sekuler versus Syariat Islam

Indikasi yang cukup kuat bahwa masyarakat Jabodetabek intoleran tidak cukup mengantarkan mereka untuk bersetuju pada penerapan syariat Islam sebagai landasan penyelenggaraan negara. Sejumlah (50,2%) responden menolak gagasan tentang pemberlakuan syariat Islam sebagai dasar hukum di Indonesia. Syariat Islam sebagaimana yang saat ini tengah diperjuangkan oleh beberapa kelompok, menurut pandangan warga Jabodetabek sebaiknya tidak dijadikan acuan bagi kehidupan bernegara.

Namun demikian, kelompok yang mendukung pemberlakuan syariat Islam tidak bisa dianggap remeh. Angka (35,3%) persetujuan responden agar syariat Islam dijadikan dasar penyelenggaraan negara merupakan tantangan serius bagi para penyelenggara negara yang bertugas mengawal Pancasila dan Konstitusi RI. Sedangkan (14,4%) sisanya menjawab tidak tahu. [Lihat Grafik 48]

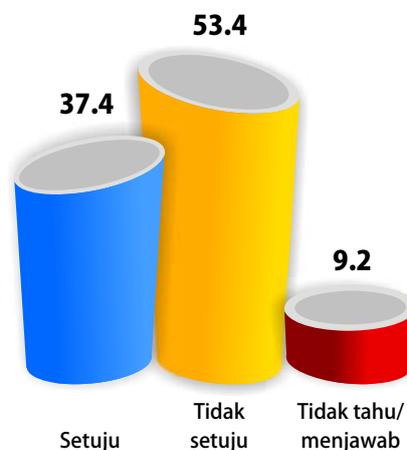
**Grafik 48:**  
**Syariat Islam di Jadikan Dasar Penyelenggaraan Negara**



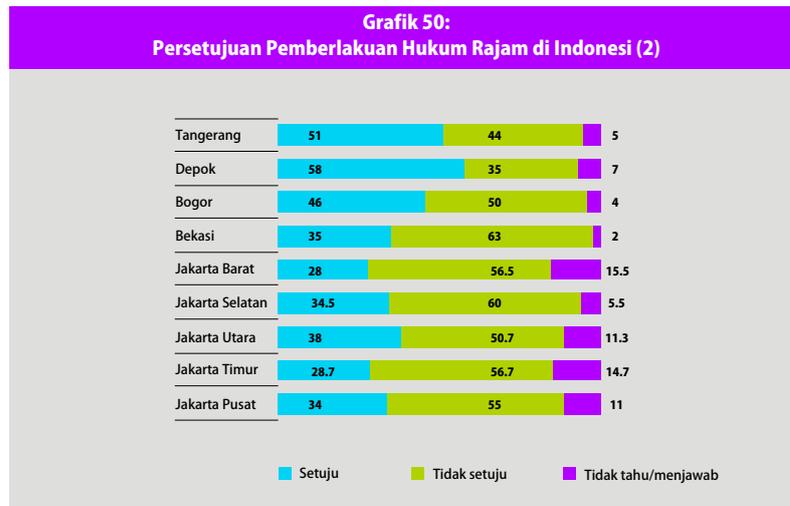
Tanggapan responden tentang perlunya syariat Islam menjadi dasar penyelenggaraan negara Islam bisa jadi sejalan dengan penilaiannya tentang pemerintah yang selama ini tidak sungguh-sungguh menjalankan Pancasila, padahal Pancasila adalah dasar negara. Apatisme masyarakat terhadap gerak pembangunan dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan cita-cita pada pendiri bangsa sangat mungkin telah mengkonstruksi pendapat responden dalam survey ini.

Konsekuensi dari ditolaknya penerapan syariat Islam sebagai dasar penyelenggaraan negara adalah penolakan responden terhadap kemungkinan diterapkannya secara resmi hukum rajam bagi pelaku zina di Indonesia. Pandangan masyarakat ini mengisyaratkan bahwa penolakan terhadap penerapan syariah Islam sebagai norma umum ke dalam dasar negara dengan sendirinya juga memunculkan penolakan terhadap salah satu bentuk kongkrit dari syariat Islam (khususnya hukum pidana Islam). **[Lihat Grafik 49]**

**Grafik 49:**  
**Persetujuan Pemberlakuan Hukum Rajam di Indonesia (1)**



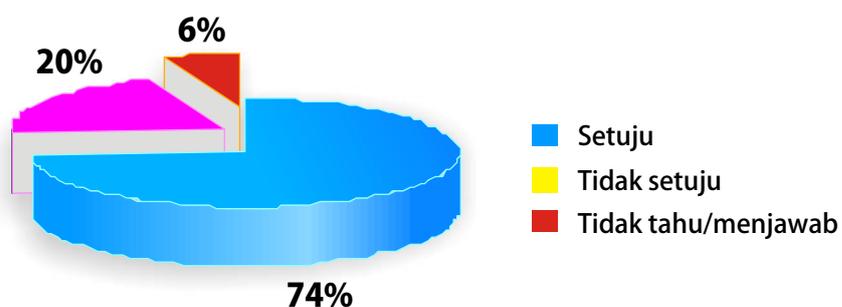
Berdasarkan domisili responden terdapat temuan menarik terkait dengan sikap mereka terhadap kemungkinan diterapkannya hukum rajam bagi pelaku zina. Mereka yang berdomisili di sebagian besar wilayah—yang terdiri dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Bekasi –menyatakan penolakannya, sementara warga yang bermukim di Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi bersikap sebaliknya dan menunjukkan tarikan yang cukup kuat. **[Lihat Grafik 50]**



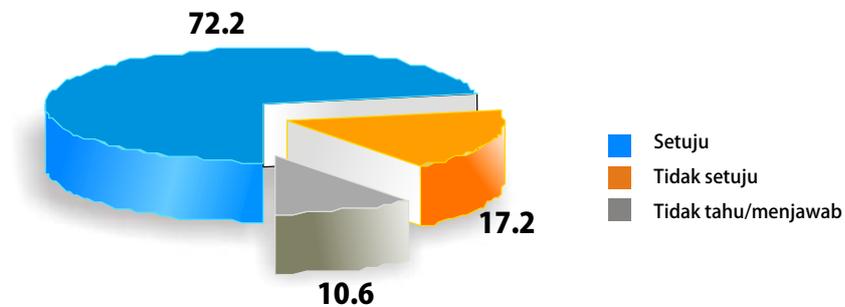
Berbeda dengan persepsi responden terhadap syariat Islam terkait hukum pidana Islam, dalam hal ibadah dan muamalat sebagian besar responden menyatakan persetujuannya jika pelajar yang beragama Islam diwajibkan menggunakan Jilbab. Pandangan ini boleh jadi didasarkan atas pertimbangan bahwa penggunaan jilbab bukan merupakan elemen syariat Islam yang dapat mempengaruhi kehidupan publik yang lebih besar. Di sisi lain, pandangan semacam itu agaknya sekadar ekspresi yang menggambarkan dukungan tentang perlunya identitas keagamaan. Dengan demikian, pandangan ini tidak dapat dinilai sebagai sebuah sikap ekstrem atau radikal.

Besarnya dukungan terhadap elemen syariat Islam bidang ibadah dan muamalat juga tergambar dari dukungan sebagian besar responden terhadap perbankan syariat di Indonesia dan label halal dalam setiap produk makanan. [Lihat Tabel 51, 52 dan 53]

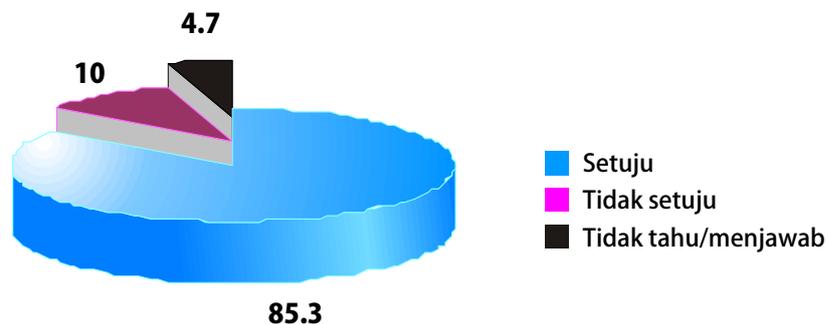
**Grafik 51:**  
**Dukungan terhadap Pewajiban Jilbab bagi Pelajar Islam**



**Grafik 52:**  
**Dukungan terhadap Perbankan Syariah di Indonesia**



**Grafik 53:**  
**Dukungan terhadap Label Halal**

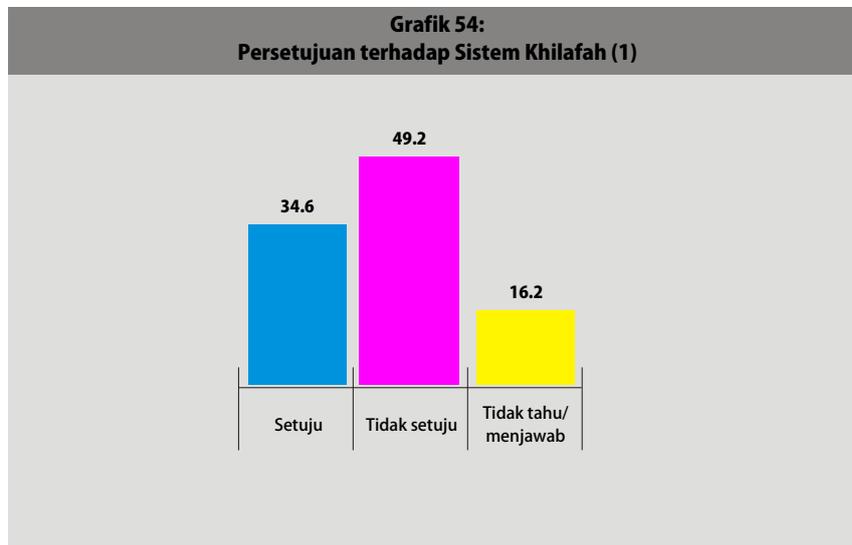


## 2.6. Demokrasi versus Khilafah

Bagi sebagian warga Jabodetabek (49,2%), tidak ada tempat bagi sistem khilafah (pemerintahan global berdasarkan syariat Islam) di negeri ini. Pandangan semacam ini tampak sejalan dengan tolakan terhadap penerapan Syariat Islam sebagai dasar bernegara. Cara pandang ini boleh jadi karena mereka menganggap terdapat semacam kesamaan prinsip antara syariat Islam dalam skala nasional dengan sistem khilafah yang berskala internasional.

Namun demikian sejumlah (34,6%) responden justru menyatakan persetujuannya terhadap sistem khilafah. Sisanya (16,2%) menyatakan tidak tahu. Sekalipun jumlah yang setuju dan tidak setuju dengan sistem khilafah

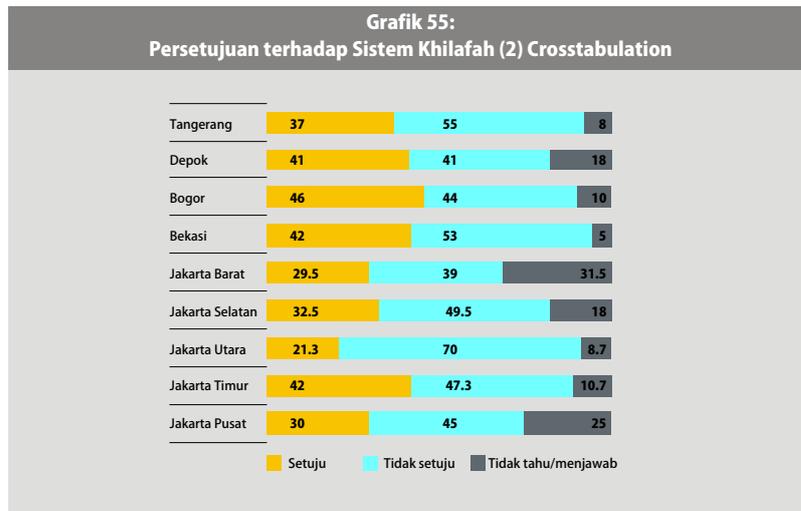
terpaut cukup signifikan, tapi temuan survey ini membuktikan bahwa gagasan khilafah telah diterima oleh sebagian masyarakat. [**Lihat Grafik 54**]



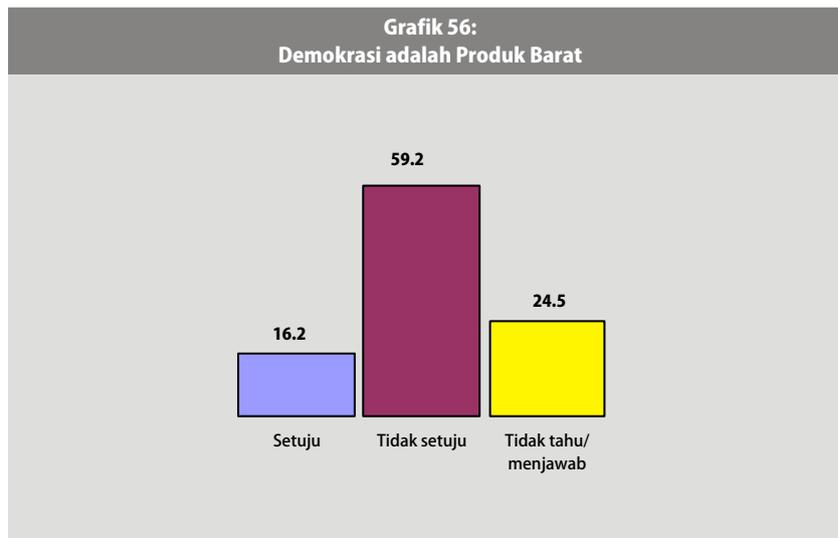
Penolakan terhadap penerapan syariat Islam dan khilafah sebagaimana yang diekspresikan masyarakat, boleh jadi merupakan sinyal penting bagi kelompok-kelompok yang saat tengah mengupayakan terwujudnya kedua sistem tersebut sebagai dasar negara. Kedua sistem itu, sebagaimana yang diperlihatkan melalui hasil survey ini, agaknya masih belum memperoleh ‘pasar luas’ di Indonesia, setidaknya di wilayah Jabodetabek. Sekalipun kedua gagasan itu telah bersemai di hati masyarakat.

Jika survey ini dapat diposisikan sebagai upaya uji publik atas kedua gagasan itu, maka hasilnya telah dapat menggambarkan sejauh mana tingkat penerimaan masyarakat terhadap syariat Islam dan sistem khilafah saat ini. Dengan demikian, klaim tentang adanya arus dukungan yang cukup kuat terhadap kedua sistem itu, sebagaimana yang kerap disuarakan oleh para pengusungnya, bukan isapan jempol. Dukungan itu nyata.

Berdasarkan domisili responden terlihat bahwa di sebagian wilayah sistem Khilafah tidak memperoleh dukungan kuat dari masyarakat. Tapi di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi memperlihatkan kecenderungan berbeda. Di keempat wilayah pinggiran Jakarta ini ini dukungan dan tolakan terhadap sistem khilafah relatif berimbang. [**Lihat Grafik 55**]



Besarnya dukungan atas gagasan pemberlakuan syariat Islam dan khilafah tampaknya sebagian besar dipengaruhi oleh cara pandang responden yang menyatakan bahwa sistem demokrasi adalah buatan Barat. Sejumlah (16,2%) responden menganggap bahwa demokrasi adalah produk Barat. Meski demikian, sebagian besarnya menganggap tidak setuju dengan pernyataan bahwa demokrasi adalah produk Barat (59,2%). Sisanya (24,5%) menyatakan tidak tahu. **[Lihat Grafik 56]**



# 3

## KESIMPULAN

1. Secara umum dapat dikatakan bahwa anggota masyarakat Jabodetabek yang terjaring melalui survey ini merepresentasikan gabungan tipologi kelas menengah-bawah dan kelas bawah-atas. Hal ini antara lain terlihat dari: (1). Latar belakang pendidikan rata-rata mereka didominasi oleh tingkat SLTA/SMU atau sederajat, dan (2). Pengeluaran rumah tangga/keluarga yang umumnya berada di bawah 2 juta rupiah setiap bulan. Dengan demikian, responden umumnya memang bukan dari jenis anggota kelas sosial profesional urban (kelas menengah-tengah). Ini berarti bahwa karakteristik sosial dari responden yang terjaring dalam survey ini setidaknya mendekati karakteristik sosial masyarakat Jabodetabek pada umumnya.
2. Dalam perilaku keagamaan—khususnya terkait dengan ketaatan beragama—masyarakat Jabodetabek terbelah ke dalam dua sikap yang relatif berimbang. Sebagian mengaku menjalankan agamanya dengan taat, sementara sebagian lainnya merasa biasa saja atau kurang terlalu taat dalam beragama. Kecenderungan perilaku keagamaan ini agaknya dilatarbelakangi oleh kuatnya 'tarikan' kehidupan urban yang memiliki kemampuan untuk 'memaksa' individu menjadi lebih rasional di satu sisi serta 'endapan' nilai-nilai tradisi yang tidak dapat hilang sepenuhnya di sisi lain (Ian Roxborough, 1990)
3. Toleransi masyarakat Jabodetabek terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan relasi sosial, seperti berteman, bertentangan, dan mengikuti perkumpulan. Sedangkan dalam relasi-relasi yang lebih privat - seperti anggota keluarga yang menikah dengan orang lain yang beda agama dan anggota keluarga yang pindah ke agama lain- warga Jabodetabek memperlihatkan kecenderungan yang intoleran. Mereka pada umumnya merasa keberatan adanya kemungkinan semacam itu. Warga Jabodetabek juga merasa keberatan jika di dekat tempat tinggalnya terdapat rumah ibadah dari umat agama lain. Rumah ibadah dari agama lain yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal rupanya masih menjadi persoalan sensitif bagi warga Jabodetabek. Di sisi lain, mereka tampaknya menolak adanya kebebasan bagi setiap umat beragama—setidaknya untuk umat beragama lain—untuk mendirikan

rumah ibadah. Lebih dari itu, terhadap kelompok Ahmadiyah, keberadaan agama lain di luar yang diakui negara dan orang-orang yang tidak memiliki agama, sifat intoleran tampaknya juga cukup kuat mewarnai sikap warga Jabodetabek.

4. Meskipun warga Jabodetabek memperlihatkan kecenderungan intoleran relasi-relasi yang lebih privat, mereka pada umumnya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berbagai bentuk tindakan/aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Bahkan, mereka beranggapan bahwa pelaku tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagai kumpulan orang yang tidak memahami ajaran agama. Pernyataan ini secara implisit mengandung pengertian bahwa praktik atau tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama berada di luar pemahaman agama yang dianut warga Jabodetabek. Dengan kata lain, mereka tidak dapat membenarkan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama.
5. Terkait dengan Terorisme, sebagian besar warga Jabodetabek menganggap bahwa pemicu utama dari terorisme adalah ketidakadilan ekonomi. Pilihan penanganan aksi terorisme juga disarankan tidak melulu menembak mati atau menghukum mati, tapi yang utama justru aspek deradikalisasi melalui pembinaan.
6. Pancasila diyakini masih merupakan sebagai dasar terbaik penyelenggaraan negara, meskipun sebagian besar responden menilai bahwa para penyelenggara negara tidak sungguh-sungguh menjalankan Pancasila. Bahkan sebagian besar masyarakat justru menganggap Pancasila sebagai bukan sesuatu yang harus diacu alias biasa saja.
7. Prilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di tengah masyarakat dan di kalangan penyelenggara negara mendorong sebagian masyarakat memberikan penilaian bahwa sebaiknya syariat Islam menjadi pilihan dasar penyelenggaraan negara. Meskipun tidak dominan tapi dukungan untuk ini cukup signifikan. Dukungan pemberlakuan syariat Islam dalam hal-hal yang sifatnya muamalat nyaris mendekati dukungan mayoritas responden. Sedangkan yang terkait dengan pidana Islam dukungan belum membesar. Seluruh potensi menggeser Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara adalah tantangan serius bagi para penyelenggara negara. Sejalan dengan itu, kampanye gagasan tentang khilafah sebagai sebuah alternatif pemerintahan juga mulai menuai dukungan. Sekalipun belum signifikan tapi dukungan itu telah nyata.

8. Lalu, apa yang dapat disimpulkan dari beberapa temuan survey ini? Secara keseluruhan, sikap dan pandangan keagamaan masyarakat Jabodetabek, berdasarkan temuan survey ini, memperlihatkan kecenderungan intoleran. Sebagai warga dari lingkungan sosial yang bersifat urban, pandangan atau sikap semacam ini dapat dikatakan sebagai sebuah 'keunikan' tersendiri. Sikap ini agaknya berbeda dengan asumsi umum yang diterima secara luas bahwa masyarakat urban biasanya diidentikkan dengan ciri rasional dan toleran.
9. Namun demikian, sikap atau pandangan keagamaan semacam ini tidak dapat dikatakan sebagai fundamentalis, atau setidaknya, belum memasuki tahap fundamentalis. Meski cenderung intoleran, survey ini memperlihatkan bahwa warga Jabodetabek tidak fundamentalis/ radikal, apalagi mendukung tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Setidaknya, sampai saat ini, kekerasan dalam memperjuangkan nilai-nilai agama masih berada di luar pemikiran warga Jabodetabek. Radikalisme keagamaan merupakan tahap lanjut dari sikap intoleran, yang berujung pada terorisme. Terorisme adalah puncak dari intoleransi. Dengan kata lain, sikap intoleran hanya membutuhkan satu anak tangga untuk meningkat menjadi radikal/ fundamentalis. Namun demikian, sikap intoleran warga Jabodetabek sesungguhnya menyimpan potensi untuk bereskalasi ke arah yang 'lebih tinggi.' Tumbuhnya dukungan atas formalisasi dan positivisasi syariat Islam sebagai dasar hukum nasional, boleh jadi, akan membesar dengan pemicu faktor eksternal lanjutan.
10. Saat ditanyakan tentang faktor-faktor apa saja yang memungkinkan seseorang dapat 'terjerumus' ke dalam terorisme yang mengatasnamakan agama hanya sebagian kecil saja yang menyatakan bahwa hal itu dilatarbelakangi oleh aspek ideologi—dalam arti: adanya dorongan-dorongan internal untuk mewujudkan sistem negara Islam. Lebih dari itu, mereka juga beranggapan bahwa keterlibatan orang-orang muda ke dalam tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama agaknya lebih didorong oleh pengaruh/ajakan pihak lain, dan bukan atas dorongan keyakinannya sendiri. Sebagian besar berpendapat bahwa faktor yang melatarbelakangi munculnya terorisme adalah ketidakadilan ekonomi dan politik. Ini berarti bahwa faktor-faktor eksternal merupakan stimulus bagi munculnya terorisme yang mengatasnamakan agama.
11. Secara tidak langsung, faktor-faktor lingkungan eksternal berupa ketidakadilan politik dan ekonomi yang menjadi inkubator munculnya

tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama dan terorisme, dapat pula berlaku pada diri responden. Dengan memperhatikan tingkat pendapatan rata-rata keluarga/rumah tangga responden yang umumnya berada di bawah dua juta per bulan, maka apa yang mereka nyatakan sebagai 'ketidakadilan ekonomi menyebabkan munculnya terorisme' dapat berarti bahwa mereka—yang merupakan representasi dari masyarakat lapis bawah dalam struktur piramida sosial di Jabodetabek—sebenarnya juga berada pada kondisi 'ideal' untuk 'melampaui' pandangan intoleran. Lahan untuk mentransformasi pandangan intoleran menjadi 'bentuk lain' telah cukup tersedia.

12. Munculnya pandangan tentang 'ketidakadilan ekonomi dan politik sebagai pemicu terorisme yang mengatasnamakan agama' jelas merupakan persoalan yang berada di luar jangkauan warga Jabodetabek. Dua bidang ini merupakan domain negara. Ini berarti bahwa efek kebijakan ekonomi dan politik terhadap masyarakat akan sangat menentukan terbuka atau tertutupnya ruang bagi munculnya berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Lebih dari itu, pendapatan rumah tangga/keluarga warga Jabodetabek yang umumnya dua juta per bulan itu jelas amat rentan terhadap pasang-surut dan goncangan ekonomi makro. Di sisi lain, kekisruhan yang melanda dunia perpolitikan di tanah air, dapat pula menjadi faktor penting yang dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan institusi-institusi politik. Atas dasar itu, kecenderungan masyarakat untuk mencari -atau setidaknya membayangkan- 'alternatif' lain dari sistem ekonomi dan politik yang ada juga terbuka lebar.
13. Bersamaan dengan kondisi kehidupan urban yang 'modern' sekaligus 'keras', masyarakat lapis bawah Jabodetabek -sebagaimana yang tercermin dari karakteristik responden dalam survey ini- kerap kali terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak selalu menguntungkan mereka. Kondisi Jabodetabek sebagai wilayah urban agaknya tidak berbeda jauh dengan kota-kota sejenis di berbagai negara Dunia Ketiga. Kelompok-kelompok sosial lapis bawah yang bertarung untuk bertahan hidup kerap dihadapkan pada situasi yang 'keras'. Modernisasi dan pertumbuhan yang mengiringi perkembangan kota umumnya sulit 'diikuti' penghuni yang berada lapis bawah piramida sosial. (Dean K. Forbes, 1986).

14. Mayoritas lapis bawah yang umumnya tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber daya strategis, terutama ekonomi dan politik, telah dipaksa menyaksikan secara kasat mata kehidupan segelintir manusia yang hidup dalam kelimpahan dan kemewahan di suatu wilayah yang sama. Dua jenis nasib yang kontras ini hidup berdampingan di wilayah urban Jabodetabek. Berbagai bentuk kesenjangan ekonomi dan politik, dalam momen tertentu, dapat menyeret mereka ke dalam 'alineasi' dan frustrasi sosial yang berkepanjangan. Hal ini antara lain ditandai oleh sikap-sikap reaksioner, mudah menerima hasutan dan siap untuk dimobilisasi. Situasi seperti ini merupakan lahan subur bagi munculnya berbagai bentuk ideologi berbasis identitas dan anti-demokrasi (Ian Roxborough, 1990). Pandangan keagamaan warga Jabodetabek yang cenderung intoleran, dengan demikian, telah memenuhi sebagian dari prasyarat bersemainya ideologi berbasis identitas dan anti-demokrasi. Ini berarti bahwa embrio bagi bersemainya ideologi semacam itu telah tersedia. Faktor-faktor dinamika ekonomi dan politik akan sangat menentukan kelanjutan embrio ini di kemudian hari.
15. Di tengah-tengah kekosongan ideologi transformatif yang diwariskan negara Orde Baru, 'alineasi' dan frustrasi masyarakat urban Jabodetabek yang berada di lapis bawah akhirnya 'menemukan' Islam sebagai jawaban yang rupanya lebih dapat memberikan jaminan 'kepastian'—terlepas dari kenyataan bahwa mereka, atau setidaknya sebagian dari mereka, berasal kalangan yang secara ritual justru tergolong biasa saja atau bahkan tidak taat. Rangkaian hasil temuan survey ini, dengan demikian, dapat memberikan gambaran bahwa 'Islam' agaknya bukan faktor utama yang menyebabkan terjadinya sikap intoleran. Jika asumsi ini dapat diterima, maka 'Islam' sesungguhnya tidak lebih dari katalisator -yang suatu saat dapat menjadi kanal- dari frustrasi yang dialami warga Jabodetabek yang berada di lapis bawah. Hari ini warga Jabodetabek cenderung intoleran, namun masih menolak fundamentalisme, kekerasan atas nama agama dan formalisasi syariah Islam. Jika kondisi eksternal mereka—terutama ekonomi dan politik—tidak banyak mengalami perubahan yang berarti atau bahkan bertambah buruk, maka tidak tertutup kemungkinan sikap intoleran warga Jabodetabek dapat mengalami metamorfosis menjadi massa yang siap dimobilisasi oleh gerakan Islam fundamentalis.[]